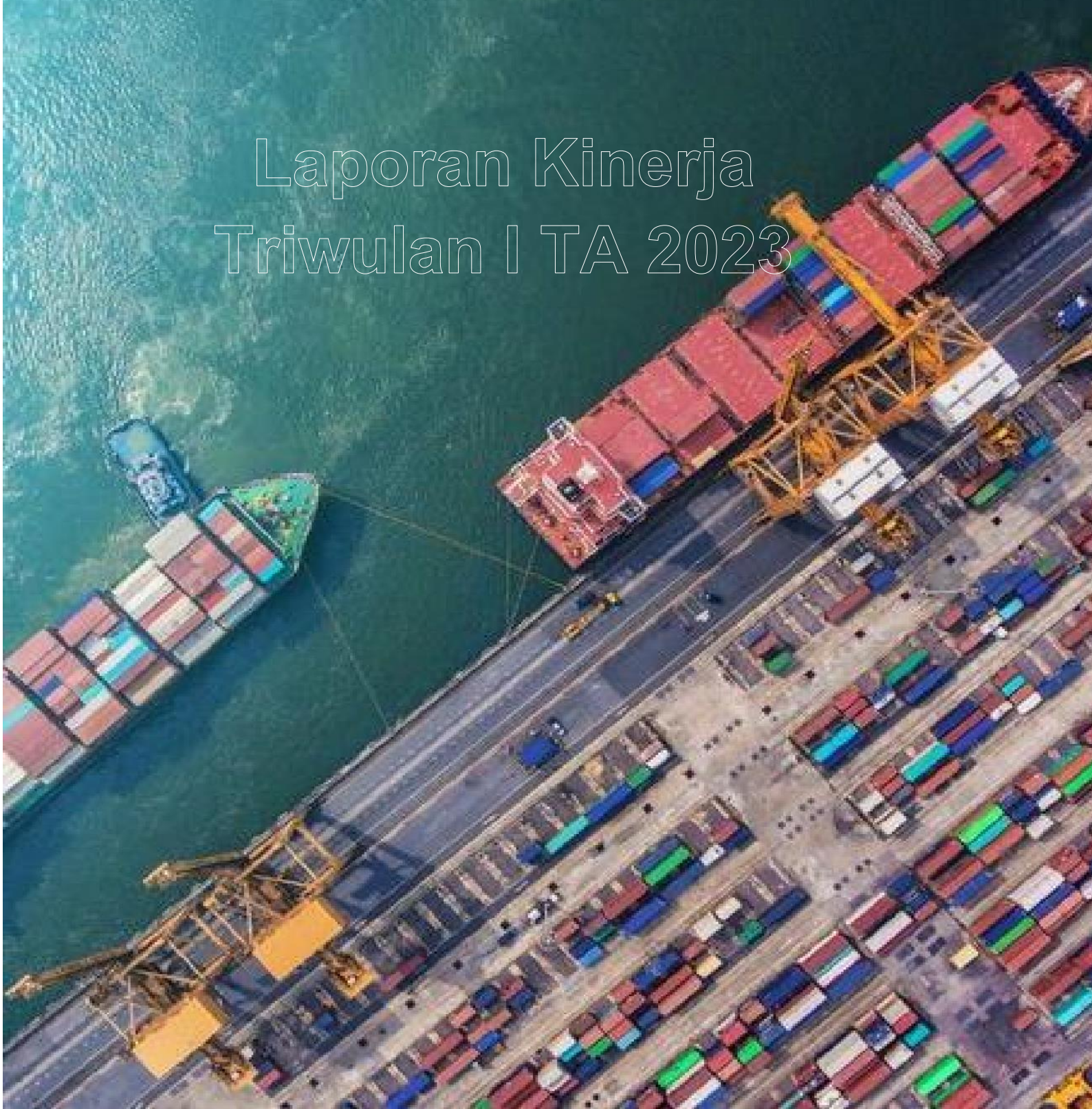


Laporan Kinerja Triwulan I TA 2023



Direktorat Logistik



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2022 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, April 2023

Direktur Logistik

Berny A. Subki

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan I Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan;
- (2) Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (3) Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP;
- (4) Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik;
- (5) Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi;
- (6) Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan;
- (7) Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- (8) Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan;
- (9) Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang;
- (10) Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan;
- (11) Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen;
- (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton;
- (13) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku;
- (14) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku;
- (15) Tercapainya Nilai PNBPDitjen PDSPKP;
- (16) Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dan

(17) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik

Sasaran strategis di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, seluruh Sasaran Srategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan I Tahun 2023 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2023 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan I Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5 Permasalahan Utama	6
1.6 Sistematika Penyajian	7
II. Perencanaan Kinerja	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	11
2.1.2 Kebijakan	11
2.2 Perjanjian Kinerja	11
III. Akuntabilitas Kinerja	16
3.1 Capaian Kinerja	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik.....	84
IV. Penutup	88
4.1. Kesimpulan	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan. Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan I Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

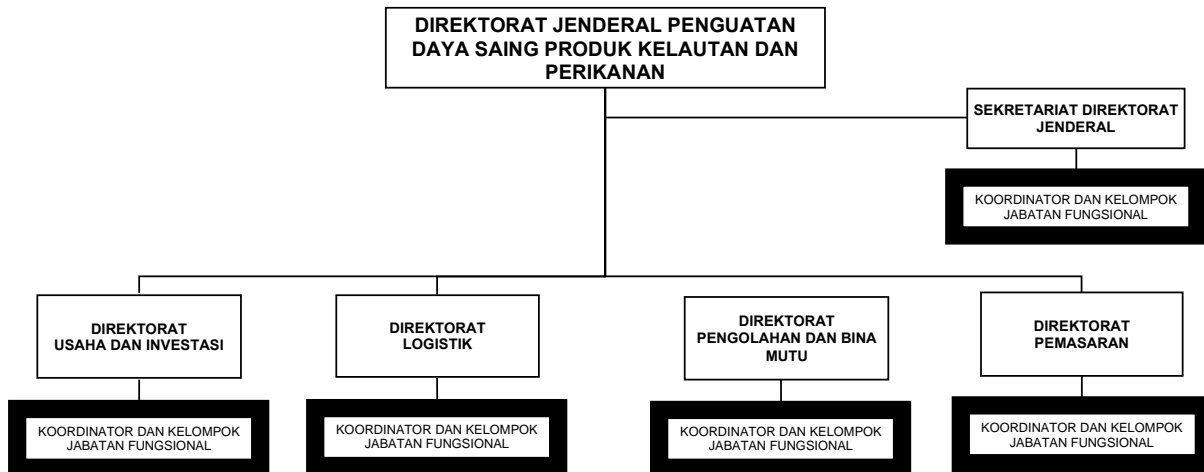
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Direktorat Logistik langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Kelompok Pemetaan dan Pemantauan;
2. Kelompok Tata Niaga;
3. Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan;
4. Kelompok Distribusi;
5. Kelompok Tata Usaha.



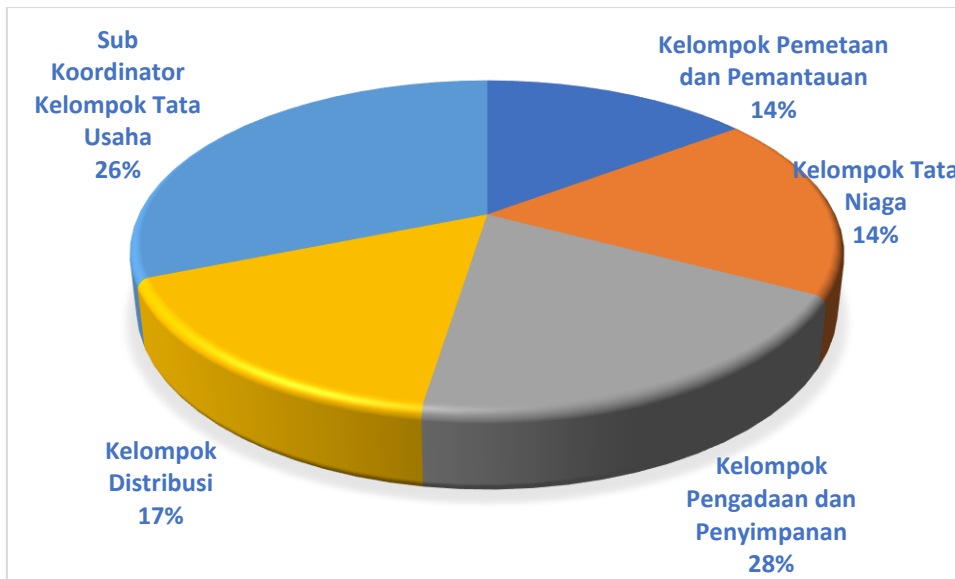
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 70 orang, dengan rincian sebagai berikut:

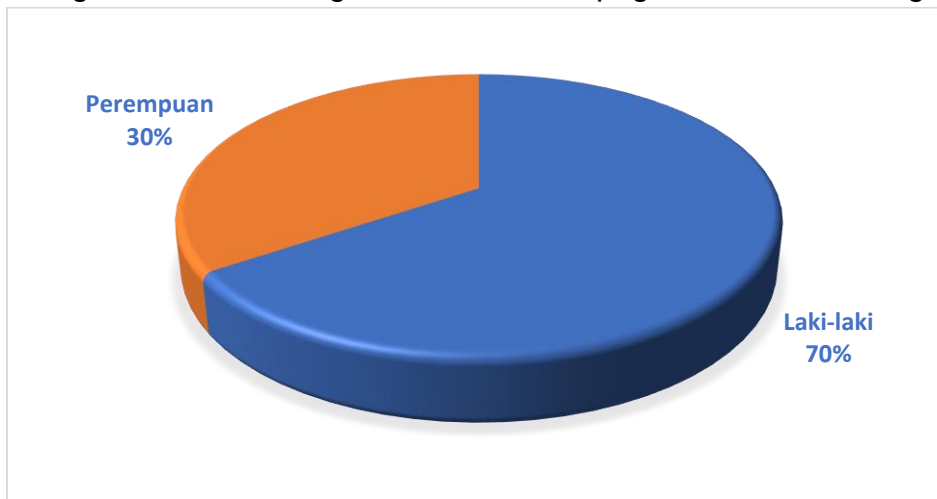
1. Jumlah pegawai menurut unit kerja

Apabila dilihat dari gambar di bawah, jumlah pegawai menurut unit kerja terbanyak terdapat di Kelompok Tata Usaha, yakni 18 orang, atau sekitar 26% dari total pegawai Direktorat Logistik. Sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat di Kelompok Tata Niaga dan Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, yakni 9 orang atau setara dengan 14% dari total jumlah pegawai Direktorat Logistik.



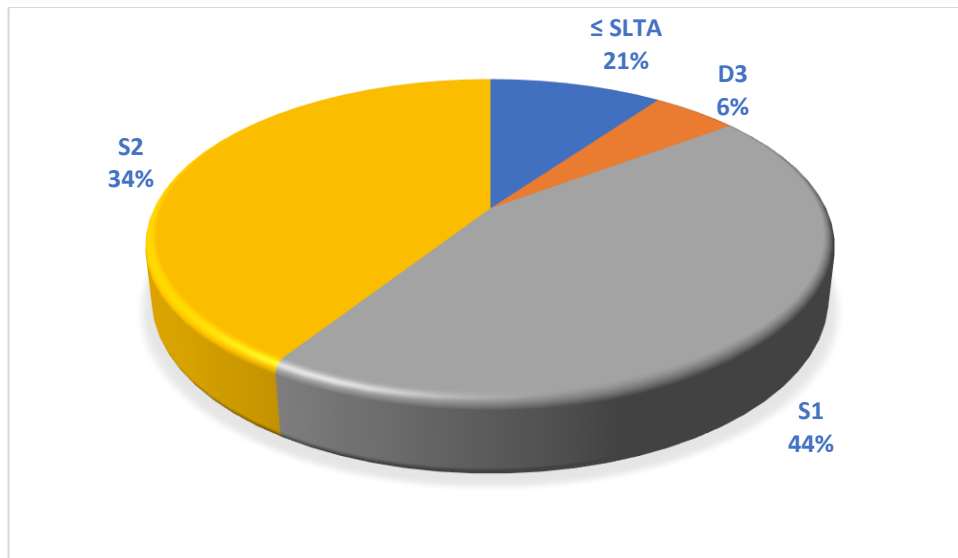
Gambar 2. Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 49 orang, atau setara dengan 70% dari total pegawai Direktorat Logistik, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau setara dengan 30% dari total pegawai Direktorat Logistik.



Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S2 sebanyak 34 orang, S1 sebanyak 44 orang, D3 sebanyak 6 orang, ≤ SLTA sebanyak 15 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Logistik terbanyak dengan tingkat pendidikan S2 dan S1, yakni mencapai 44%, sedangkan yang paling sedikit adalah dengan tingkat pendidikan D3, yakni sebanyak 6%.



Gambar 4. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
2. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
3. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
4. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
5. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
6. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
7. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi

yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.

8. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan I Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama TW I tahun 2023;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

MISI

Kedaulatan (Sovereignty):

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keberlanjutan (Sustainability):

mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

Kesejahteraan (Prosperity):

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Direktorat Logistik langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2023 mempunyai 17 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; (3) Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP; (4) Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik; (5) Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi; (6) Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan; (7) Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan; (8) Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan; (9) Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang; (10) Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan; (11) Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen; (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku; (14) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (15) Tercapainya Nilai PNBPDitjen PDSPKP; (16) Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dan (17) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	2
4.	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	1
		5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	1
5.	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	6.	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	18
6.	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	7.	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	18
7.	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	8.	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	19
8.	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	9.	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	26
9.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	8
10.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan		mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	
11.	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	12.	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	1
12.	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	13.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	1
13.	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	14.	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	1
14.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	15.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	242
15.	Tercapainya Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP	16.	Nilai PNBPN Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	6,66
16.	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	17.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	1.215
17.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	18.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	83,2
		19.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	80,5
		20.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik (%)	≤0,5
		21.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	75
		22.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		23.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95
		24.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan	77,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)	
		26.	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5

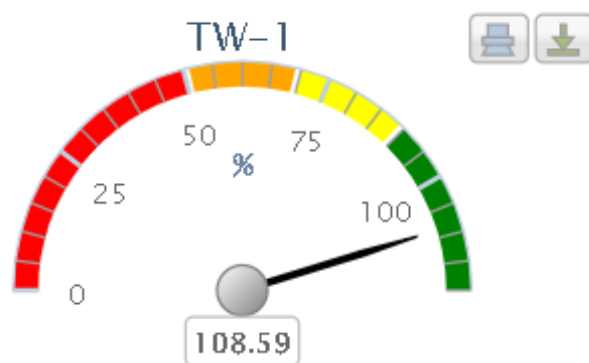
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2023 memiliki 26 indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan, 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran dan 21 indikator kinerja yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Maret 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik sampai dengan TW I sebesar 108,59 jika dibandingkan dengan Nilai capaian TW I tahun 2022 sebesar 105 atau peningkatan sebesar 3,4%. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, sehingga tidak ada rekomendasi untuk perbaikan pada Triwulan II.



Warna	Keterangan
Baik	≥ 100
Cukup	$70 - < 100$
Kurang	< 70
Belum ada penilaian	
Belum input capaian	

Gambar. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW I Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW I	sd TW I		
1	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	Koridor	5	-	-	-	PA
2	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	1	-	-	-	PA
3	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Data	2	-	-	-	PA
4	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Lembaga	1	-	-	-	PA
		Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Rekomendasi kebijakan	1	-	-	-	PA
5	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	5	5	100	PA
6	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	3	3	100	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW I	sd TW I		
7	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	19	-	-	-	PA
8	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	26	-	-	-	PA
9	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	8	2	3	150	PA
10	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	3	-	-	-	PA
11	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	1	-	-	-	PA
12	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	1	-	-	-	PA
13	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	1	-	-	-	PA
14	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	242	-	86	-	PA
15	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	Miliar	6,66	-	-	-	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW I	sd TW I		
16	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	Orang	1.215	-	-	-	PA
17	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	83,2	-	-	-	PA
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	Nilai	80,5	-	-	-	PA
		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	≤0,5	-	-	-	PA
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	75	75	98	130,67	RR
		Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	Persentase	92	92	100	108,69	PA
		Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	95	-	-	-	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW I	sd TW I		
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA
		Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Matrik rencana aksi

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA			CAPAIAN OUTPUT BERKALA			
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	
Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan		10.000									
1	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	Penyusunan Dokumen Laporan pengelolaan koridor	5	Koridor	-	-	-	-	-	-	-
Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP		2.000.000									
2	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Implementasi Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP		1.467.500									
3	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Penyusunan Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	2	Data	-	-	-	-	-	-	-
Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik		1.990.000									
4	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Pembinaan Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	1	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
5	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Penyusunan Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-
Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi		900.000									

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA			CAPAIAN OUTPUT BERKALA		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
6	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)		18	Kesepakatan	-	-	5	-	-	5
Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan		900.000								
7	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)		18	Kesepakatan	-	-	3	-	-	3
Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan		43.083.549								
8	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)		19	Unit	-	-	-	-	-	-
Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan		22.627.937								
9	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin)	21	Unit	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mobil refrigerasi (MP korporasi)	2	Unit	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	3	Unit	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang		800.000								
10	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)		8	Lembaga	-	1	1	-	-	3
Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan		1.000.000								
11	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas		3	Lembaga	-	-	-	-	-	-

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA			CAPAIAN OUTPUT BERKALA			
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	
	mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)										
Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen		500.000									
12	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)		1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton		381.296									
13	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)		1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)		225.496									
14	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)		1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)		1.158.408									
15	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)		242	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP		50.000									
16	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)		12	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP		50.000									
17	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)		1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		451.542									

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA			CAPAIAN OUTPUT BERKALA		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
lingkungan Direktorat Logistik										
18	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	Pemenuhan dokumen indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	Pemenuhan dokumen Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
20	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Pemenuhan dokumen tindak lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
21	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Pemenuhan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
22	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	Pemenuhan dokumen sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
23	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Perhitungan persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Pemenuhan dokumen Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
25	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Logistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA			CAPAIAN OUTPUT BERKALA		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
26	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)		1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

1. Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Definisi indikator ini adalah Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (storage), transportasi (transportation), dan pelayanan (delivery services) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (point of origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (material management) dan (b) distribusi. Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (point of origin) ke titik tujuan (point of destination) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2023 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \sum a$$

x :

Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola

a :

Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola

Data dukung berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan

yang terkelola merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.

Tabel 4. Target dan capaian IK 1

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target 2023
1	SK1. Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan						
	IK1. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	Koridor	PA	-	5	-	-

3.2.2. Sasaran Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

2. Indikator Kinerja Kegiatan Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \Sigma a$$

x : Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan

a : Jumlah Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan

Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan

perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 2

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target 2023
2	SK2. Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan						
	IK2. Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu awal sebesar Rp2.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp353.667.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Realisasi keuangan sampai dengan TW I sebesar Rp319.886.236,- atau sebesar 19,43% dari pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

2.1. Sosialisasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) untuk Pelaporan Neraca Komoditas Hasil Perikanan

Sosialisasi STELINA untuk pelaporan neraca komoditas hasil perikanan dilaksanakan 3 kali selama Triwulan I yaitu :

- a. Pada hari selasa, 7 Februari 2023 di Jakarta. Dihadiri oleh secara luring perwakilan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal PSDKP, Sekretariat Ditjen PDSPKP, PUSDATIN, Sekretariat BKIPM, Perwakilan pelaku usaha: PT. DKSH Indonesia, PT. IMCD Indonesia, PT. Masuya Graha Trikencana, PT. Marina Lautan Sejahtera Fishery, PT. Dua Putra Perkasa Pratama, PT. Satya Trinadi Komira, PT. Makmur Jaya Sejahtera, CV. Sumber Laut Rezeki; dan peserta daring sebanyak 52 orang.
- b. Pada hari selasa, 28 Februari 2023 di Surabaya. Dihadiri secara luring oleh perwakilan Biro Hukum, Setjen KKP, perwakilan DKP Jawa Timur, perwakilan Direktur Pengawasan dan Pengolahan Sumber Daya Perikanan PSDKP, perwakilan Pusdatin, perwakilan kepala pangkalan PSDKP Benoa, kepala pangkalan PSDKP Cilacap, perwakilan koordinator kelompok lingkup Dit. Logistik, pelaksana lingkup kelompok pemetaan dan pemantauan dan peserta lain secara daring.

- c. Pada tanggal tanggal 6 – 8 Maret 2023 di Medan yang terdiri atas pelaksanaan kunjungan lapang serta pertemuan sosialisasi serta asistensi penginputan data realisasi impor ke dalam aplikasi STELINA. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan lingkup KKP yaitu Biro Hukum, PUSDATIN, Stasiun PSDKP Belawan, BKIPM, pelaksana lingkup Direktorat Logistik, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, PT. Sucofindo dan pelaku usaha pemegang API-U.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- Memberikan informasi terhadap Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) untuk Pelaporan Neraca Komoditas Hasil Perikanan
- membahas sistem pelaporan importasi hasil perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas, sekaligus pengenalan aplikasi STELINA sebagai sarana pelaporan.
- Pelatihan teknis aplikasi STELINA
- Menerima masukan dari stakeholder perikanan dalam pelaksanaan STELINA

Hasil kegiatan ini adalah :

- Pelaporan pada aplikasi STELINA yang telah terintegrasi dengan SiNas NK Inhouse KKP sebagai bahan dalam perumusan kebijakan terkait penjaminan ikan sebagai bahan konsumsi untuk masyarakat, dan sebagai komoditas perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
- Ditjen PDSPKP melakukan evaluasi Neraca Komoditas Perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat (apabila diperlukan) yang meliputi kondisi dinamika pasokan, kebutuhan komoditas perikanan.
- Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor wajib menyampaikan laporan melalui aplikasi STELINA yang isinya paling sedikit meliputi:
 - a. Data pembelian (lokal dan impor)
 - b. Data penjualan dan distribusi
- Hasil Evaluasi yang dilakukan Ditjen PDSPKP dapat dijadikan sebagai:
 - a. Bahan monitoring dan evaluasi NK di Tingkat Kemenko Bid. Perekonomian;
 - b. Bahan pertimbangan perubahan NK
- Hal- Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pelaporan:
 - a. Pelaku usaha dihimbau untuk memperhatikan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan importasi dan distribusi hasil perikanan.
 - b. Melakukan pelaporan dengan memperhatikan ketepatan data pada pemasukan dan penjualan hasil perikanan.

- c. Melakukan *profiling* pada mitra pembelian dan penjualan sebagai *database pencatatan*.

DOKUMENTASI



Jakarta



Surabaya



Medan

3.2.3. Sasaran Kegiatan Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP

3. Indikator Kinerja Kegiatan Data dan informasi logistik hasil KP (Data)

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, dan data pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2023 adalah 2 (dua) Data dan Informasi Logistik Hasil KP dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = a + b$$

X :

Data dan Informasi Logistik Hasil KP

a :

Data Pengukuran Kinerja Logistik

b :

Data Pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 6. Target dan capaian IK 3

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target 2023
3	SK3. Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP						
	IK3. Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Unit	PA	-	2	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp 1.467.500.000,-. Adanya blokir

anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp440.250.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp201.560.859,- atau sebesar 19,62% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

3.1. Tinjauan Lapangan untuk Kesiapan Hulu Hilir pada Penangkapan Ikan Terukur di Beberapa Pelabuhan Perikanan Zona 03

Tinjauan lapangan dilakukan di beberapa lokasi dalam rangka Penangkapan Ikan Terukur (PIT) antara lain sebagai berikut :

a. PPN Ambon

- 1) Dilaksanakan oleh Staff Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Inspektur II KKP, perwakilan Ditjen PSDKP, Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Logistik, PPN Ambon PSDKP Ambon dan BKIPM Ambon. Diskusi dan penghimpunan informasi difasilitasi oleh Kepala Pelabuhan PPN Ambon
- 2) Produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPN Ambon sebelum adanya kebijakan moratorium pelarangan kapal buatan luar negeri mencapai rata-rata 74.320 ton per tahun dengan nilai produksi rata-rata Rp. 1,03 triliun per tahun (periode 2011-2014). Selanjutnya untuk produksi perikanan tangkap sejak diberlakukannya moratorium sampai dengan saat ini terjadi penurunan mencapai rata-rata 3.030 ton per tahun dengan nilai produksi rata-rata Rp. 64,86 miliar per tahun (periode 2015-2022).
- 3) PPN Ambon memiliki aset dan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan PIT dan PNBP Pasca Produksi, berupa: fasilitas pokok (lahan, dermaga, jalan), fasilitas fungsional (kantor administrasi dan pelayanan, kantor syahbandar, SPBUN), dan fasilitas penunjang (balai pertemuan nelayan, MCK, kios).
- 4) Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kesiapan untuk pelaksanaan PIT dan PNBP Pasca Produksi di PPN Ambon antara lain:
 - Pendaratan ikan di PPN Ambon masih sangat rendah (sepi)
 - Waktu pembongkaran ikan lama
 - Tenaga pendataan produksi ikan belum cukup
 - Ketersediaan air bersih belum mencukupi
 - Penambahan sarana lain penunjang PIT
 - Pengendalian sampah yang berasal dari kapal perikanan.
 - Kelancaran proses logistik ikan keluar dari PPN Ambon
 - Terdapat potensi PNBP di PPN Ambon

b. PPN Tual dan PP Tual

- 1) Dilaksanakan tanggal 26 Januari 2023 bersama dengan Dirjen PSDKP, Ketua Tim Percepatan PIT, Inspektur II KKP, Direktur PDK, Kepala PPN

- Tual, Kepala Pangkalan PSDKP Tual, dan perwakilan Direktorat Kepelabuhan Perikanan serta unit kerja terkait di lingkup KKP.
- 2) Berdasarkan data historis, PPN Tual pernah mencatatkan data produksi pendaratan ikan pada tahun 2007 mencapai 145.666 ton yang berasal dari 236 unit kapal penangkap ikan berizin pusat (rata-rata ukuran 100 GT). Namun dalam perkembangannya mengalami penurunan produksi drastis hingga saat ini dengan capaian produksi sebesar 1.878 ton pada tahun 2022 yang berasal dari 25 unit kapal penangkap ikan berizin pusat (rata-rata berukuran 60 GT).
 - 3) PPN Tual memiliki lahan seluas 16 Ha dan 6,12 Ha telah dimanfaatkan dan 10 Ha yang masih kosong dapat digunakan untuk kawasan industri. Terdapat dermaga sepanjang 176 m dengan lebar 6 m. Kedalaman kolam pelabuhan antara 6 m (saat surut) dan 10 m (saat pasang). Dermaga PPN Tual dapat ditambati kapal berukuran di atas 30 GT hingga 70 (tujuh puluh) unit kapal perikanan. Dermaga telah dibagi menjadi 2 (dua) zona bongkar untuk mengantisipasi antrian pembongkaran ikan hasil tangkapan. *Cold Storage* (CS) berkapasitas 200 ton berfungsi dengan baik. Kamera pemantau (CCTV) telah ditempatkan di sekitar 6 titik yang tersebar di dermaga, halaman kawasan pelabuhan, dan kantor PPN Tual.
 - 4) Pemda Kota Tual dan Pemda Kab. Maluku Tenggara mendukung pelaksanaan PIT dan berharap penerapan PIT di PPN Tual dan PP Swasta Tual dapat memiliki efek berlanjut bagi masyarakat Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara sebagaimana pernah tercatat dalam sejarah tahun 2007 sebagai salah satu pusat perikanan di wilayah timur Indonesia, serta berharap terbuka lapangan kerja baru, terbukanya usaha perikanan dan pendukungnya serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu harapan juga terkait perlunya reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) agar kabupaten/kota yang memiliki kekayaan laut memperoleh DBH yang lebih proporsional.
- c. PP Benjina
- 1) Dilaksanakan oleh perwakilan Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Logistik, Pangkalan PSDKP Tual, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru.
 - 2) PP Benjina dibangun diatas 4 hektar lahan daratan dari total wilayah kerja daratan 76 hektar dan 36 hektar wilayah kerja perairan.
 - 3) Dalam menunjang kegiatan hilir, PP Benjina sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: Pabrik es kapasitas 900 balok (berat 120 kg per balok); Kecukupan air bersih untuk nelayan dan cuci ikan berasal dari air 8 water reservoir tadah hujan dengan kapasitas 500.000 m³; Listrik bersumber dari genset (3 unit caterpillar @ 650 kva; 1 unit hino @ 225 kva; 1 unit cummins @ 250 kva); Tiga belas (13) unit cold storage kapasitas @ 400 ton (beroperasi 1 unit), Satu (1) unit processing plant; Satu (1) UPI untuk penanganan/pemilahan dan penimbangan udang hasil tangkapan (tahap pembangunan); Transportasi pengangkutan ikan

- berupa 5 truk dan 5 forklift; Satu (1) IPAL sederhana (bak pengendapan limbah pabrik) dan Timbangan manual di atas kapal (timbangan di darat kondisi rusak).
- 4) Pelaporan ikan hasil tangkapan saat ini dilakukan melalui form logbook (manual); Nilai produksi ikan belum rutin dilaporkan; Produksi yang ada saat ini adalah 2,1 ton udang, berasal dari kapal yang hanya beroperasi kurang lebih 1 minggu dan harus kembali ke pelabuhan karena mengalami kerusakan mesin pendingin.
 - 5) PNB/PAD Non SDA belum ada karena belum ada layanan yang dilakukan oleh Pelabuhan. PNB SDA perikanan belum ada karena 1 kapal yang beroperasi milik perusahaan masih dengan skema PNB Praproduksi; Belum ada pelaporan evaluasi dari kepala Pelabuhan (Sudah ada SK Perusahaan penunjukan Kepala Pelabuhan).
 - 6) Belum ada kegiatan layanan yang dilakukan oleh pelabuhan karena kapal yang beroperasi 1 unit; Belum ada pembagian alur masuk dan keluar kapal dari dan menuju pelabuhan; Area pendaratan ikan di dermaga dengan jalur langsung dari arah laut; Jalur ikan menuju UPI berupa jalan komplek Pelabuhan dari dermaga. Jalur ikan keluar dari Pelabuhan hanya melalui jalur laut; Jalur masuk ke Pelabuhan melalui jalur laut dan udara; Belum ada layanan pengaduan.
 - 7) Identifikasi alur pengiriman produk perikanan dari Pelabuhan Benjina antara lain :
 - Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut/EMKL (pengiriman domestik) atau freight forwarder (ekspor) menuju Pelabuhan Benjina.
 - Plugging (fasilitas EMKL atau freight forwarder) dan stuffing. Reefer container 40 feet mampu mengangkut udang 20 ton kemasan karton atau ikan curah sebanyak 25 ton.
 - Pengangkutan reefer container ke perairan Dobo.
 - Pemandahan reefer container ke kapal tongkang.
 - Menunggu kedatangan kapal shipping line.
 - Pemandahan reefer container dari tongkang ke kapal shipping line.
 - Lama pengangkutan Dobo - Surabaya selama 5 hari.
 - Muatan tujuan akhir Jakarta dilanjutkan dengan kereta api dengan total door to door selama 7 hari.

d. PP. Dobo

- 1) Dilaksanakan oleh perwakilan Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Logistik, Pangkalan PSDKP Tual, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2) Dalam menunjang kegiatan hilir, PPP Dobo sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa:
- 3) Gudang beku 1 unit kapasitas 40 ton dilengkapi 2 ABF kapasitas @ 20 ton; Tempat pelelangan ikan luas 288 m² (belum berfungsi); Pabrik es tidak ada listrik (saat ini berasal dari PLN docking kapal); Timbangan manual di atas kapal; Keranjang 2400 buah; Troli 150 buah; Air bersih berasal dari 1 sumur bor di pelabuhan dengan kapasitas penampung air 20 ton (air payau);
- 4) Pembongkaran ikan dari 1 kapal ukuran > 30 GT sekitar 6- 12 jam, 2-3 kapal menunggu antrian bongkar dalam 1 hari pada saat musim ikan

(Agustus - Desember). Terdapat alternatif pelabuhan pendaratan lain di Zona tersebut yaitu PP Benjina. Sisa lahan masih dimungkinkan untuk pengembangan sesuai dengan masterplan yang sudah ada. Direncanakan untuk pembangunan MCK, mess nelayan, klinik, ruko dll.

- 5) Kecukupan air bersih untuk nelayan dan cuci ikan berasal dari 1 sumur bor di Pelabuhan dengan kapasitas penampung air 20 ton. Ketersediaan perbekalan dan konsumsi di sekitar pelabuhan untuk kapal diusahakan sendiri oleh pemilik kapal dari diangkut menggunakan kendaraan pasar Dobo. Tersedia sarana kesehatan dan keselamatan RSUD Cenrawasih Dobo. Tersedia SAR Daerah dan BPBD di Dobo. Tersedia sarana parkir di depan kantor Pelabuhan dan kantor Pos jaga. PPP Dobo memiliki tenaga keamanan dari Polsek 1 orang dan satpam pelabuhan 4 orang.
- 6) Jumlah kapal dan ikan yang didaratkan rutin dilaporkan setiap hari melalui PIPP dan setiap bulan ke dinas provinsi. Pelaporan ikan hasil tangkapan dari kapal sudah menggunakan e log book. Nilai produksi dilaporkan melalui PIPP sedangkan untuk laporan ke Dinas KP dilakukan setiap 6 bulan. PNBK PAD dilaporkan ke Dinas KP setiap bulan, meliputi: tambat labuh kapal, karcis masuk, air, dan pemanfaatan workshop alat penangkapan ikan. PNBK pasca produksi belum ada. Kepala pelabuhan melakukan evaluasi setiap tiga bulan.
- 7) Identifikasi alur pengiriman produk perikanan dari Pelabuhan Dobo:
 - Produk perikanan diangkut ke perairan dobo.
 - Stuffing ke reefer container dilakukan sejak 3 hari sebelum kapal shipping line datang.
 - Fasilitas plugging menggunakan tenaga genset disediakan oleh perusahaan EMKL atau freight forwarder.
 - Pindahan reefer container dari tongkang ke kapal shipping line.
 - Lama pengangkutan Dobo - Surabaya selama 5 hari.
 - Muatan tujuan akhir Jakarta dilanjutkan dengan kereta api, total door to door selama 7 hari.
 - Lama pengangkutan Dobo – Jepang port to port selama 11 hari

PPN Ambon



PPN Tual dan PP Tual



PP Benjina



PP Dobo



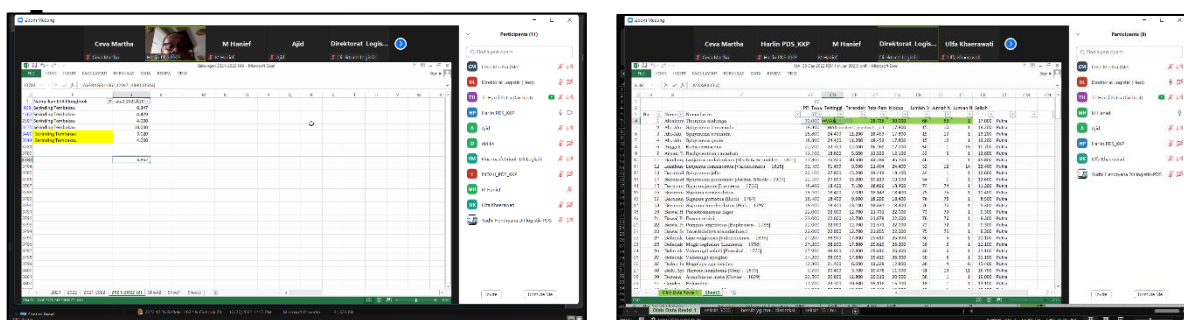
3.2. Rapat Penetapan Harga Acuan Ikan

Rapat penetapan Harga Acuan Ikan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 secara daring. Rapat dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Ketua tim Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Bapak Agus Suherman, Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Koordinator Kelompok Pemantauan dan Analisis Kepelabuhan Perikanan, Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, Koordinator Kelompok Tata Niaga dan Pelaksana lingkup Direktorat Logistik.

- Tujuan rapat adalah merumuskan hasil rekapitulasi data harga per pelabuhan per WPP yang disepakati dan akan digunakan sebagai lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Harga Acuan Ikan.
- Hasil antara lain sebagai berikut :
 1. Harga Acuan Ikan (HAI) digunakan sebagai dasar pengenaan pungutan hasil perikanan yang dibebankan kepada pemilik kapal pasca produksi. HAI ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk tahun berikutnya. Cakupan wilayah harga tersebut hanya berlaku per pelabuhan pendaratan dari kapal.
 2. HAI diperoleh dari penghitungan harga rata-rata tertimbang per jenis ikan per pelabuhan di tingkat produsen. HAI digunakan sebagai salah satu komponen penghitungan nilai produksi ikan pada saat didaratkan.
 3. Sumber data HAI berasal dari data dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang kewenangannya berada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- Harga Acuan Ikan disusun dengan mencantumkan 385 jenis ikan dilengkapi dengan nama latin di 77 pelabuhan perikanan dan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan.

DOKUMENTASI

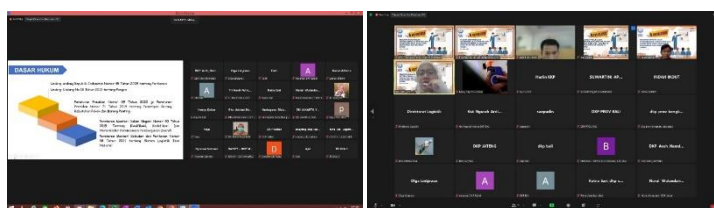


3.3. Sosialisasi Pedoman Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga Ikan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)

Sosialisasi Pedoman Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga Ikan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2023 secara daring. Rapat dipimpin oleh kordinator kelompok pemetaan dan pemantauan dan dihadiri oleh perwakilan DKP Provinsi seluruh Indonesia.

- Tujuannya adalah : memberikan Informasi kepada Provinsi sebagai panduan untuk menyamakan pemahaman dalam pemilihan sumber data dan metode penghitungan ketersediaan dan kebutuhan ikan.
- Hasil :
 - Untuk memastikan kecukupan pangan yang berasal dari produksi sendiri (lokal) pada saat HBKN dilakukan dengan membandingkan prognosa ketersediaan dengan prognosa kebutuhan. Apabila ketersediaan **lebih besar** dari kebutuhan maka kelebihan ikan dapat didistribusikan ke luar wilayah. Apabila ketersediaan **lebih kecil** dari kebutuhan maka kekurangan ikan dapat dipasok dari luar wilayah
 - Pemantauan Harga Ikan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya wawancara langsung dengan pedagang ikan, bekoordinasi dengan instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Mencari data harga eceran dari sumber lain yang relevan (website)
 - Hasil penyusunan prognosa ketersediaan, kebutuhan serta pemantauan harga ikan tingkat Provinsi sebagaimana formulir/kuesioner pada lampiran pedoman dilaporkan kepada Dirjen PDSPKP c.q. Direktur Logistik pada **H-14 sebelum pelaksanaan Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru**

DOKUMENTASI



3.4. Pengembangan Pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) pada Moda Pengangkutan Darat

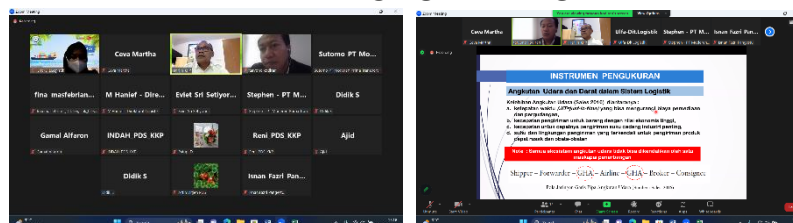
Rapat pengembangan pengukuran IKLI dilaksanakan pada hari Senin, 27 Maret 2023 secara daring di Jakarta. Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan dan dihadiri oleh Dr. Taryono (IPB University), perwakilan PT. Indo Bahari, perwakilan PT. Wahana, perwakilan koordinator kelompok lingkup Dit. Logistik dan pelaksana kelompok Pemetaan dan Pemantauan.

Tujuan dari rapat ini adalah untuk mendapatkan informasi dalam menyusun konsep pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan menggunakan moda pengangkutan darat.

Hasil :

1. Pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) berdasarkan moda pengangkutan laut berbasis *reefer container* perlu pengembangan, salah satunya dengan integrasi moda pengangkutan darat sebagai moda pengangkutan dengan kontribusi dominan. Pemetaan tantangan dalam pengiriman ikan menggunakan moda angkutan darat penting untuk mengetahui dampak terhadap logistik ikan secara keseluruhan
2. Pengiriman Ikan bersifat musiman, volume pengangkutan jarak dekat dan jarak jauh berimbang. Tidak ada perbedaan alat angkut untuk jarak pengangkutan dekat atau jauh.
3. Kendala yang dihadapi pemilik barang berdasarkan mesin pendingin yang dimatikan oleh driver perusahaan jasa logistik untuk menghemat bahan bakar, yang mengakibatkan barang sampai ditujukan dikatakan cair oleh penerima barang.

DOKUMENTASI



3.2.4. Sasaran Kegiatan Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik

4. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik pusat yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok

Σa :

Jumlah Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok

Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan target pada Triwulan IV sebesar 1 lembaga.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 7. Target dan capaian IK 4

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				sdTW1	TA 2023	TW1	% thd target TW4
4	SK4. Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik						
	IK4. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan

yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga) dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp95.173.890,- atau sebesar 13,59% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

4.1. Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan

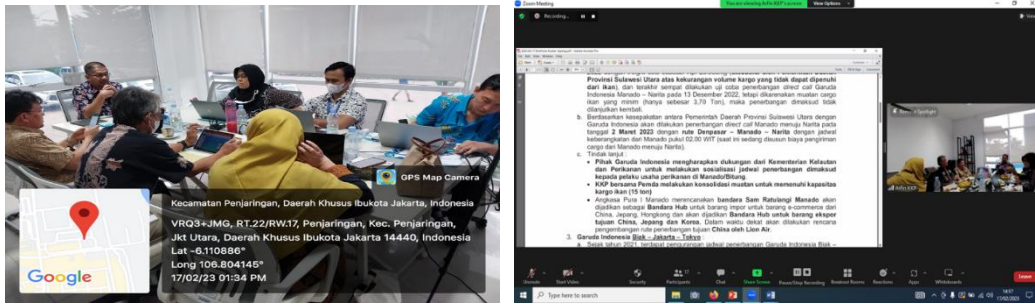
Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP di Jakarta, pada tanggal 21 Februari 2023. Rapat dihadiri oleh Pembina Mutu Ahli Utama Koordinator Kelompok Lingkup Dit Logistik, APHP Madya Lingkup Dit Logistik, Subkoordinator Kelompok Tata Laksana Pemasukan, Subkoordinator Kelompok Tata Logistik, Subkoordinator Kelompok Pemetaan, serta Pelaksana Kelompok Tata Niaga.

Tujuan: pembahasan alternatif koridor logistik ikan dan rencana revisi Kepmen 15 tahun 2020 tentang penetapan koridor.

Hasil :

- a. Latar belakang penyusunan:
Referensi koridor tersebut seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional dan pelaksanaan kegiatan di masing masing kelompok Direktorat Logistik. Pelaksanaan kegiatan di luar koridor yang saat ini telah ditetapkan atau belum terakomodir, disebabkan tahap perintisan, ataupun membutuhkan intervensi pemerintah. Koridor saat ini juga masih fokus pada jalur laut. Perlu reformulasi agar memenuhi pertimbangan cakupan wilayah seluruh Indonesia, sebagai dasar dalam pemetaan pelaksanaan kegiatan.
- b. Alternatif koridor utama sebagai opsi antara lain:
Koridor 1: Sumatera, Kalimantan Bagian Barat ↔ Jawa; Koridor 2: Nusa Tenggara Bali ↔ Jawa, Makassar; Koridor 3: Papua Maluku ↔ Jawa, Makassar; Koridor 4: Sulut, Gorontalo, Sultra, Sulteng (Banggai), Maluku Utara ↔ Jawa; Koridor 5: Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar ↔ Jawa, Makassar
- c. Penentuan alternatif koridor ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan narasumber/tenaga ahli, hanya sebagai pemberi pertimbangan, bukan *men-drive* hasil akhir kajian dan kebijakan.
- d. Pertimbangkan beberapa program prioritas KKP dalam penentuan alternatif koridor ini, antara lain: Penangkapan Ikan Terukur, Kampung Nelayan Maju, Kampung Budidaya, Harga Acuan Ikan, dll

DOKUMENTASI



5. Indikator Kinerja Kegiatan Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Pemasukan hasil perikanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku nasional. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) rekomendasi kebijakan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas

Σa :

Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas

Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 8. Target dan capaian IK 5

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target 2023
5	SK4. Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik						
	IK5. Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan) dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp 92.910.769,- atau sebesar 13,27% terhadap pagu setelah AA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

5.1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

Rapat dilaksanakan tanggal 12 Januari 2023 di Jakarta. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum-Sekjen KKP, perwakilan Setditjen Perikanan Budidaya dan Direktorat Produksi Ditjen Perikanan Budidaya, perwakilan Setditjen Perikanan Tangkap, Koordinator Kelompok Tata Niaga, Sub Koordinator Kelompok Tata Laksana Pemasukan, Pelaksana pada Kel TN.

Tujuan rapat adalah membahas penyesuaian mekanisme NK sesuai Perpres No.32/2022 tentang Neraca Komoditas, dan Permenko Perekonomian nomor 16 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas; dan Menambahkan pengaturan penyusunan NK untuk calon induk, induk, benih ikan, inti mutiara dan Mutiara.

Hasil :

1. Amanat pelaksanaan NK dan latar belakang penyempurnaan Permen KP tentang Penyusunan NKP, yaitu: UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan UUCK dan PP 27 sempat di hold pelaksanaannya karena adanya keputusan MK dalam merespon gugatan terhadap uji materi UUCK. UUCK ditetapkan Mei 2021, tp hold sejak November 2021.

2. UU No. 11/2020-Cipta Kerja, (Amanat Penyederhanaan, percepatan dan transparansi, kemudahan Perizinan Berusaha) diturunkan menjadi beberapa PP.
3. Permen KP 24/2021 harus direvisi, karena:
 - a. Permen KP 24/2021 terbit lebih dulu dibanding Perpres No. 32 tahun 2022-Neraca Komoditas dan Permenko Perekonomian nomor 16 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas, mengingat pelaksanaan UUCK sempat dihold karena adanya gugatan uji materi;
 - b. Terdapat penambahan komoditas baru yaitu: Induk, calon induk, benih ikan, Mutiara dan inti Mutiara yang pemasukannya akan menggunakan mekanisme NK pada tahun 2024 (pengajuan usulan pada tahun 2023).

DOKUMENTASI



5.2. Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Kegiatan Analisis Kebutuhan Impor Komoditas Perikanan untuk Bahan Baku Usaha Pemindangan.

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di Bogor, dengan menghadirkan tenaga ahli dari Akademisi IPB University (Bapak Purwanto), serta perwakilan dari: Pusdatin KKP, Setditjen PT, Setditjen PB, Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran, Koordinator Kelompok Distribusi, Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, Subkoordinator Kelompok Tata Laksana Pemasukan, Subkoordinator Kelompok Tata Logistik, Subkoordinator Kelompok Pemantauan serta Pelaksana Kelompok Tata Niaga, Dit Logistik. Tujuan rapat adalah pembahasan lanjutan rencana kegiatan kajian analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku usaha pemindangan.

Hasil pembahasan disampaikan sebagai berikut:

1. Pemindangan merupakan salah satu usaha pengolahan tradisional yang memegang peranan strategis dalam pertumbuhan ekonomi di sektor hilir perikanan dikarenakan menyangkut aspek nilai sosial ekonomi masyarakat yang meliputi serapan tenaga kerja, upah serta memberikan pengaruh nilai tambah hasil perikanan. Selama periode tahun 2020-2022, kebutuhan bahan baku pemindangan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6% per tahun. Pada tahun 2020, kebutuhan bahan baku pemindangan sebesar 513.719 ton menjadi 577.900 ton pada tahun 2022.

2. Sebagai komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sektor usaha hilir perikanan, perlu adanya pasokan yang dapat menjamin ketersediaan bahan baku dengan kuantitas yang mencukupi dan kualitas yang baik. Penyediaan bahan baku peminangan menghadapi tantangan mengingat sebagian besar bahan baku tergantung pada produksi hasil tangkapan ikan pelagis yang cenderung dipengaruhi oleh pola musim penangkapan ikan.
3. Akan dilakukan pencermatan dan penghitungan bersama antara tenaga ahli dengan tim Direktorat Logistik guna mengetahui kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku usaha peminangan dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh.
4. Terkait data produksi lemuru, kiranya DJPT dapat menyampaikan data produksi ikan lemuru (*sardinella lemuru*), yang sebagian digunakan sebagai bahan baku pindang.



5.3. Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2023.

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 di Jakarta, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Tata Niaga, dihadiri perwakilan dari: Pusdatin KKP, Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, Subkoordinator Kelompok Tata Laksana Pemasukan, Subkoordinator Kelompok Tata Logistik, Subkoordinator Kelompok Pemantauan serta Pelaksana Kelompok Tata Niaga, Dit Logistik. Tujuan rapat adalah untuk membahas usulan perubahan neraca komoditas (NK) Tahun 2023.

Hasil pembahasan rapat sebagai berikut:

1. Perlu penyelesaian penyempurnaan/revisi juknis verifikasi usulan kebutuhan impor melalui mekanisme NK. Perlu pembahasan lebih lanjut untuk usulan perubahan NK tahun 2023 yang telah disampaikan, karena beberapa pelaku usaha menanyakan hal tersebut.
2. Call center belum merespon pelaku usaha sudah hampir 1 minggu. Petugas hendaknya segera merespon WA dari pelaku usaha yang masuk meskipun hanya sekedar formalitas saja, (terima kasih, kami akan tindaklanjuti).

3. Usulan perubahan rencana kebutuhan telah disampaikan oleh pelaku usaha, baik terkait perubahan komponen data yang berkaitan dengan Rakortas (penambahan volume, jenis barang, dll) ataupun yang non rakortas (pintu pemasukan, negara asal, dll)
4. Beberapa usulan perubahan rencana kebutuhan telah disampaikan oleh pelaku usaha, antara lain: Ayanaa Putri Pratama, Jaya Samudra Bersama, Bandar Jaya Sentosa, Alamsegar Jaya, Jaspo Internasional Pratama, SUSHI-TEI Indonesia, Eternal Stars Ocean, Gema Manggala Chemindo, Fishindo Lestari Bersama, Cenhong Fisherindo, Mina Rizki Abadi (Komira), Satya Trinadi Komira Perkasa, Delisari Nusantara, Megasetia Agung Kimia, Anugerah Mina Sejahtera, Distribusi Mebel Nusantara, Jalur Sutera Mas, Anugrah Maritim Sentosa, dan Berkah Maritim Sentosa.
5. Perlu dikonfirmasi ke LNSW dan Pusdatin, agar setiap perubahan rencana kebutuhan, mengacu pada volume hasil penetapan, bukan dari usulan awal pelaku usaha sebelum penetapan.
6. Perlu di crosscheck kembali usulan perubahan masing-masing perubahan, mengingat ada beberapa perusahaan yang berbeda usulan perubahan yang disampaikan secara lisan dengan yang tertulis di aplikasi.
7. Setiap usulan perubahan komponen data yang berkaitan dengan Rakortas, maka akan dilakukan verifikasi lapangan lebih lanjut.
8. Terkait usulan perubahan data distribusi, mintakan kontrak dan rencana distribusi hingga end user kepada perusahaan yang mengajukan.
9. Dalam melakukan verifikasi perlu memperhatikan:
 - a. Bukti kontrak/PO dari pelaku usaha yang menjadi tujuan distribusi yang paling sedikit memuat nama pembeli, alamat, no telp, jenis ikan, volume, nilai, dan ditandatangani oleh pembeli.
 - b. Apabila distribusi melalui supplier atau pedagang perantara: Bukti kemitraan dengan pemidang/pengolah.



3.2.5. Sasaran Kegiatan Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi

6. Indikator Kinerja Kegiatan Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Dokumen kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan

Σa :

Jumlah dokumen kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan

Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan I tercapai 5 kemitraan.

Capaian TW 1 adalah sebesar 5 kemitraan atau 100% dari target. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 9. Target dan capaian IK 6

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target sd TW4
6	SK5. Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi						
	IK6. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka	Kesepakatan	PA	5	18	5	27,77

	pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)						
--	--	--	--	--	--	--	--

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan Dalam rangka pengadaan dan penyimpanan dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp270.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp146.385.892,- atau sebesar 16,27% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

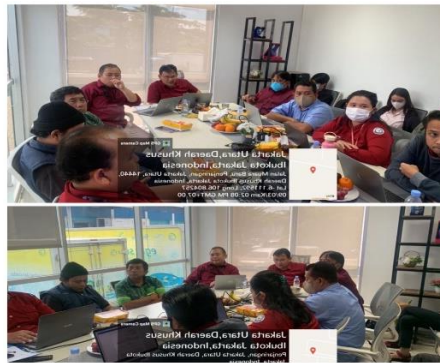
6.1. Rapat Persiapan Focus Group Discussion Fasilitasi Kemitraan Pengadaan Dan Penyimpanan Hasil Perikanan Di Cold Storage 1000 Ton Muara Baru

Rapat dilaksanakan pada 9 Maret 2023 di Jakarta, dipimpin oleh Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan dan dihadiri oleh Subkoordinator Pengadaan, Subkoordinator Penyimpanan, Subkoordinator Penyimpanan, perwakilan koordinator Kerjasama, Mitra CS 1000 ton (PT. Jaladhi Hita Abadi, PT. Menara Bahari Nusantara, PT. Arto Ulam Jaya, PT. Indo Prima, PT. Dahlia, PT. Spektra Tirta Sakti, UD. Riki Utama Mandiri dan PT. Sakana Umi Nusantara Bahari) JF APHP Madya, Manager Cold Storage 1000 Ton muara baru. Tujuannya adalah persiapan FGD dalam rangka kemitraan pengadaan dan penyimpanan dengan membahas draft kemitraan.

Hasil yang sebagai berikut :

- a. Pembahasan draft kesepakatan bersama mitra CS 1000 ton sesuai mengacu pada permen Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyesuaian isi pasal berdasarkan ketentuan dan kebutuhan agar tidak menjadi peluang pemeriksaan inspektorat. Perlu ditambahkan dengan peraturan yang sesuai oleh bagian kerjasama yang akan memperkuat dasar dibentuknya kesepakatan bersama;
- c. Format kesepakatan bersama bersifat umum dan harus diturunkan menjadi perjanjian kerjasama, diperjanjian didalamnya memuat jenis BMN dan tarif yang disepakati bersama;
- d. Beberapa kali dilakukan pertemuan dengan biro dimana kesepakatan bersama dilakukan pada lingkup KKP, KL. NGO dan dunia lain dibidang sama sedangkan kerjasama pemanfaatan dan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan dasar PMK 115;

- e. Kesepakatan bersama pada satu sisi mengakomodir dari target IKU IKK yaitu kesepakatan bersama 18, sesuai tusi yaitu penyimpanan ikan, untuk rujukan akan disesuaikan dengan peraturan yang terkait, yang menjawab IKU dan IKK terkait penyimpanan ikan di coldstorage;
- f. Perlu ditambahkan dengan peraturan yang sesuai oleh bagian Kerjasama yang akan memperkuat latar belakang. Penambahan tujuan penyimpanan untuk menjawab judul dari Kerjasama dan pada pasal pembiayaan dihapus karena tidak biaya yang dibebankan kepada para pihak;
- g. Pada pasal 2 ruang lingkup pada point a kata dimiliki dapat diganti dengan disepakati karena Cold Storage 1000 ton adalah milik Ditjen PDS KKP;
- h. Penyusunan kesepakatan bersama mengacu pada permen Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



6.2. Rapat Persiapan Focus Group Discussion Fasilitas Kemitraan Pengadaan Dan Penyimpanan Hasil Perikanan Di Cold Storage 1000 Ton Muara Baru

Rapat dilaksanakan pada 28 Maret 2023 di Jakarta, dipimpin oleh Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan dan dihadiri oleh Subkoordinator Pengadaan, Subkoordinator Penyimpanan, Subkoordinator Penyimpanan, perwakilan koordinator Kerjasama, Mitra CS 1000 ton (PT. Jaladhi Hita Abadi, PT. Menara Bahari Nusantara, PT. Arto Ulam Jaya, PT. Indo Prima, PT. Dahlia, dan PT. Sakana Umi Nusantara Bahari) JF APHP Madya, Manager Cold Storage 1000 Ton muara baru.

Tujuan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rapat persiapan Focus Group Discussion Fasilitas Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan pada tanggal 7 Maret 2023

Hasil sebagai berikut :

- a. Persiapan *Focus Group Discussion* dalam rangka hilirisasi meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui kerjasama kemitraan antar pelaku usaha serta optimalisasi pemanfaatan asset bantuan pemerintah;
- b. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengadaan dan Penyimpanan antara Direktorat Logistik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing

- Produk Kelautan dan Perikanan dengan mitra CS 1000 diantara PT. Jaladhi Hita Abadi, PT. Menara Bahari Nusantara, PT. Arto Ulam Jaya, PT. Indo Prima, PT. Dahlia, dan PT. Sakana Umi Nusantara Bahari;
- Penyampaian informasi pungutan tarif PNBP yaitu penggunaan ruang packing dan gudang kering berdasarkan PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Kebutuhan sarana prasarana seperti pslugging dimana penggunaan plugging container dilakukan mitra setiap hari dengan jumlah kebutuhan yang tidak menentu, jika kebutuhan melebihi dari sarana yang tersedia mitra akan melakukan plugging pada gudang lain dan untuk kebutuhan ABF dibutuhkan oleh mitra dalam melakukan proses pembekuan ulang pada ikan yang mencair pada saat penerimaan maupun proses tuna loin;
 - Perlunya menghitung kapasitas coldstorage untuk menentukan kapasitas simpan dan jumlah pallet yang dapat diisi, perlu dilakukan penghitungan dan desain tata letak agar maksimal penyimpanannya.
 - Ketersediaan pallet untuk dapat menjadi perhatian karena dalam proses penyimpanan ikan untuk menjaga mutu ikan diperlukan pallet agar sirkulasi udara terjaga;
 - Kualitas besi untuk bahan pallet pada pengadaan pallet harus kuat dan sesuai untuk menjaga kekuatan pada saat penyusunan ikan digudang beku.



3.2.6. Sasaran Kegiatan Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan

7. Indikator Kinerja Kegiatan Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)

Definisi indikator ini adalah Pembinaan dan Penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Supplier/pengepul dan Pengolah/industri pengolahan)

dan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 18 (delapan belas) kesepakatan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Dokumen kesepakatan kemitraan antar Pelaku usaha KP dalam rangka distribusi hasil perikanan

Σa :

Jumlah Dokumen kesepakatan kemitraan antar Pelaku usaha KP dalam rangka distribusi hasil perikanan

Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan Triwulan I adalah 3 kesepakatan dari target sd TW I sebesar 3 kesepakatan sehingga capaiannya 100% dari target sampai dengan TW I.

Tabel 10. Target dan capaian IK 7

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target sd TW4
7	SK6. Terdistribusikannya hasil perikanan dan penyediaan layanan jasa logistik						
	IK7. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan	Kesepakatan	PA	3	18	3	16,67

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan Dalam rangka distribusi hasil perikanan dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp270.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp45.864.510,- atau sebesar 5,10% terhadap

pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

7.1. Penataan Distribusi Hasil Perikanan untuk Tujuan Ekspor Menggunakan Moda Transportasi Udara.

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 secara daring. Rapat dihadiri oleh Vice President Cargo Garuda Indonesia, GM Garuda Manado, perwakilan Garuda Biak, perwakilan Lion Group, perwakilan Scoot, perwakilan Angkasa Pura I Mando, perwakilan Angkasa Pura Logistik Manado dan perwakilan Direktorat Pengolahan Bina Mutu Ditjen PDSPKP. Tujuan rapat adalah untuk memetakan distribusi hasil perikanan untuk tujuan ekspor dengan moda udara.

Hasil sebagai berikut :

- a. Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan subsidi penerbangan direct call dari Manado menuju Narita dan pada saat ini sedang di susun terkait dengan biaya pengiriman cargo dari Manado menuju Narita. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Garuda Indonesia akan dilakukan penerbangan direct call Manado menuju Narita pada tanggal 2 Maret 2023 dengan rute Denpasar – Manado – Narita dengan jadwal keberangkatan dari Manado pukul 02.00 WIT.
- b. Penerbangan direct call Garuda Indonesia Manado – Narita terakhir dilakukan pada bulan Juni 2022 dengan freight cost sebesar Rp. 26.000/kg (disubsidi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara), dan terakhir sempat dilakukan uji coba penerbangan direct call Garuda Indonesia Manado – Narita pada tanggal 13 Desember 2022 tetapi dikarenakan muatan cargo yang minim (hanya sebesar 3,70 Ton) maka penerbangan dimaksud tidak dilanjutkan kembali.
- c. Untuk mendukung beroperasinya kembali penerbangan direct call dari Manado menuju Narita pihak Garuda Indonesia mengharapkan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu melakukan sosialisasi jadwal penerbangan dimaksud kepada pelaku usaha perikanan di Manado/Bitung.
- d. Sejak tahun 2021, terdapat pengurangan jadwal penerbangan Garuda Indonesia untuk tujuan Biak – Jakarta menjadi hanya seminggu 1x (hari Kamis pukul 11.00 WITA). Untuk penerbangan tujuan ekspor selanjutnya di lakukan melalui Japan Airlines dari soekarno hatta menuju Tokyo (kerjasama Garuda Indonesia dengan Japan Airlines).
- e. Adapun muatan hasil perikanan Tahun 2022 (bulan agustus – desember 2022) dari Biak menuju Jakarta adalah sebesar 48,89 Ton (rata-rata muatan 2-3 ton per penerbangan) dengan freight cost sebesar Rp. 22.000/kg (belum termasuk biaya penanganan di bandara).

- f. Scoot Airlines merupakan maskapai penerbangan Singapura dengan jadwal penerbangan dari Manado menuju Singapura sebanyak 3x seminggu yaitu pada hari Rabu, Jumat dan Sabtu pukul 14.00 WIT.
- g. Setiap penerbangan Scoot Airlines dari Manado menuju Singapura rata-rata membawa cargo hasil perikanan sebesar 1,5 Ton dengan tujuan Singapura dan Narita (Singapura menuju Narita menggunakan Singapore Airlines).
- h. freight cost cargo melalui Scoot Airlines Manado - Singapura sebesar Rp. 45.000/kg dan freight cost cargo melalui Scoot Airlines Manado - Narita sebesar Rp. 70.000/kg.
- i. Pihak Scoot Airlines berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha perikanan di Manado/Bitung agar Scoot Airlines dapat menjadi salah satu pilihan alternatif moda transportasi udara untuk ekspor hasil perikanan via Singapura untuk tujuan China/Hongkong.
- j. Komoditas Utama Kargo eksor dari Bandara Sam Ratulangi Manado adalah Fresh Fish Tuna, Lobster, Decorative Fish, dan Buah-Buahan.
- k. Tahun 2022 terdapat volume muatan hasil perikanan dari Bandara Sam Ratulangi Manado sebesar 682,52 Ton dengan rincian sebagai berikut :
 - Fresh Fish sebesar 678,57 Ton;
 - Live Tropical Fish sebesar 2,98 Ton; dan
 - Live Fish sebesar 0,91 Ton.
- l. Bandara Sam Ratulangi Manado akan dijadikan sebagai Bandara Hub untuk barang impor untuk barang e-commerce dari China, Jepang, Hongkong dan akan dijadikan Bandara Hub untuk barang ekspor tujuan China, Jepang dan Korea.
- m. Dalam waktu dekat akan dilakukan rencana pengembangan rute penerbangan tujuan China oleh Lion Air.

7.2. Rapat Koordinasi Penataan Distribusi Hasil Perikanan untuk Tujuan Ekspor Menggunakan Moda Transportasi Udara.

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 di Manado. Dihadiri oleh Kadis KP Prov Sulut, Perwakilan Dinas perdagangan, Kadis KP Kota Manado, Kepala BKIPM Manado, Kepala PPS Bitung, Perwakilan PSDPKP Bitung, Kepala Otban Manado, Maskapai Penerbangan, Ekspedisi Muatan Penerbangan Udara (EMPU), dan pelaku usaha perikanan. Tujuan rapat adalah untuk penataan distribusi hasil perikanan dan penandatanganan kemitraan dalam rangka distribusi. Kegiatan diawali dengan penandatanganan PKS pelaku usaha (Ekspedisi Muatan Penerbangan Udara (EMPU) dan usaha perikanan) dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh VP Cargo Commercial Garuda Indonesia, GM AP I cabang Manado, Kepala Bea Cukai Manado, GM SN Cargo, dan Pelaku Usaha Perikanan.

Hasil sebagai berikut :

1. Pengoperasian kembali rute penerbangan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor dari Provinsi Sulawesi Utara menuju Jepang, khususnya untuk produk unggulan seperti hasil perikanan yang memerlukan kecepatan waktu dan proses pengiriman guna menjaga kualitas kesegaran komoditas sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih kompetitif di kancah global,” jelas dia.
2. Penerbangan direct call Manado – Narita akan dilayani sebanyak sekali seminggu, setiap Kamis (Manado-Narita) dan Selasa (Narita-Manado) per 2 Maret 2023. Penerbangan tersebut akan dilayani dengan armada A330-300 dan dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Pukul 02.10 WITA, dan dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Narita, Tokyo pada pukul 08.40 waktu setempat.
3. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, maka Direktorat Logistik mengusulkan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado menjadi Hub Ekspor produk perikanan untuk Indonesia Bagian Timur dengan langkah sebagai berikut :
 - a) Konsolidasi muatan melalui pemenuhan pasokan produk perikanan untuk tujuan ekspor dari wilayah Indonesia Bagian Timur,
 - b) Penentuan bandar udara sebagai hub dan spoke untuk ekspor produk perikanan khususnya dari wilayah Indonesia bagian timur sebagai pusat produksi;
 - c) Ketersediaan rute penerbangan langsung menuju Manado (pesawat regular dan freighter) sebagai pusat pengumpulan dari wilayah Indonesia bagian timur yang menjadi pusat produksi perikanan; dan
 - d) Pemenuhan sarana prasarana/infrastruktur pendukung untuk penanganan produk perikanan di bandar udara.



7.3. Focus Group Discussion (FGD) Penataan Distribusi Hasil Perikanan Menggunakan Moda Transportasi Laut

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 di Manado. Dihadiri oleh Perwakilan Dinas KP (Prov Sulut dan Kota Bitung), Perwakilan Lembaga (PT. Pelni, KSOP Bitung, Bea Cukai Bitung, PT. Pelindo, PT. Pelindo Terminal Petikemas Bitung), Perwakilan Eselon I lingkup KKP (BKIPM Manado, PPS Bitung, PSDPKP Bitung), Penyedia Jasa Logistik, dan Pelaku Usaha Perikanan (UPI, Koperasi Perikanan dan Supplier). Kegiatan diawali dengan penandatanganan PKS antar pelaku usaha (Pelaku Jasa Logistik dengan Pelaku Usaha Perikanan; Pelaku Usaha Perikanan dengan Penyedia Bahan Baku/Supplier) dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh GM PT. Pelindo Terminal Petikemas (TPK) Bitung, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT PELNI (Persero), Kepala PPS Bitung, Kepala BKIPM Manado, Direktur PT. Rahayu Perdana Trans, Kepala Cabang PT. Meratus Line Bitung, dan Ketua Ikatan Pengusaha Perikanan Sulawesi.

Tujuan dilaksanakan FGD ini antara lain:

- a. Melakukan pemetaan kondisi eksisting distribusi dan transportasi pada wilayah Bitung;
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dukungan program dan kegiatan K/L, Pemda & stakeholder terkait dlm rangka pengembangan Pelabuhan Umum Bitung sebagai pelabuhan hub ekspor produk perikanan untuk Indonesia Bagian Timur;
- c. Menghimpun saran strategis dari Instansi/Lembaga & stakeholder terkait dlm rangka mendukung kebijakan sistem distribusi dan transportasi hasil perikanan.



3.2.7. Sasaran Kegiatan Terbangun dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan

8. Indikator Kinerja Kegiatan Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2023 adalah 19 (sembilan belas) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \Sigma a$$

X :

Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan

Σa :

Jumlah gudang beku portable yang diadakan

Tabel 11. Target dan capaian IK 8

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target sd TW 4
8	SK7. Terbangun dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan						
	IK8. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	PA	-	19	-	-

Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023..

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Gudang Beku Portabel dengan pagu awal sebesar Rp 43.108.549.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 8.720.138.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp455.654.980,- atau sebesar 1,06% terhadap

pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

8.1. Pembahasan Penilaian Kelayakan Calon Penerima GBP TA 2023

Rapat dilaksanakan pada 14 Februari 2023 di Bogor, dipimpin oleh Subkoordinator Kelompok Pengadaan dan dihadiri oleh Taryono Kodiran, perwakilan Itjen, Fungsional APHP Madya, dan tim teknis penyaluran BP GBP TA 2023. Tujuan rapat adalah finalisasi pedoman penilaian calon penerima bantuan pemerintah GBP TA 2023 dan review pembobotan calon penerima bp gbp hasil verifikasi lapangan.

Pembobotan merupakan tahap akhir sebelum penetapan calon penerima GBP oleh PPK. hasil penilaian pembobotan berdasarkan verifikasi dan pembuktian lapangan terhadap data-data yang disampaikan calon penerima. cara pemberian skor:

Berdasarkan pembahasan internal oleh tim teknis, akan dimasukkan analisis kelayakan usaha untuk mengukur apakah calon penerima layak untuk mendapatkan bantuan berdasarkan hasil analisis rencana usaha yang disampaikan, akan tetapi belum diputuskan apakah analisis tersebut hanya sebagai tambahan justifikasi untuk menguatkan hasil pembobotan atau akan dimasukkan dalam pembobotan itu sendiri. Analisis kelayakan usaha yang dihitung antara lain B/C ratio, NPV, PBP, dan arus keluar masuk kas. Salah satu hasil perhitungan analisis kelayakan usaha adalah sebagaimana terlampir.

Tindak lanjut kegiatan finalisasi ini maka akan disampaikan memorandum dari Korkel Pengadaan dan Penyimpanan yang isinya menyampaikan draft final pedoman dan SK penetapan sebagaimana terlampir.



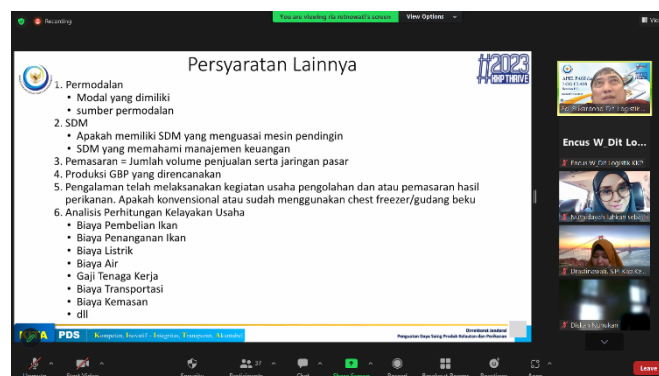
8.2. Sosialisasi Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah GBP

Rapat dilaksanakan pada 14 Februari 2023 secara daring, dihadiri oleh perwakilan Setditjen Perikanan Tangkap, perwakilan Dinas Perikanan Natuna, perwakilan Dinas Perikanan Nunukan, perwakilan Dinas Perikanan Merauke, perwakilan Dinas Perikanan Banyuwangi, perwakilan Dinas

Perikanan Kepulauan Meranti, perwakilan Dinas Perikanan Tambrauw, perwakilan Dinas Perikanan Batubara, perwakilan Dinas Perikanan Jayapura, dan perwakilan Dinas Perikanan Pinrang. Tujuannya adalah memberikan informasi terkait mekanisme penyaluran bantuan pemerintah gudang beku portable.

Pada Tahun 2022 DJPT memiliki program Kalaju sebanyak 60 Lokasi yang akan dibiayai oleh APBN, lalu 44 lokasi yang akan dibiayai dengan DAK. Dari 60 lokasi, 55 lokasi adalah aspirasi dari Komisi IV DPR dan 5 lokasi merupakan lokasi prioritas yang akan dijadikan lokasi percontohan yang akan diresmikan oleh presiden. 5 Lokasi tersebut yaitu Merauke, Natuna, Nunukan, Banyuwangi, Kepulauan Meranti. Dari 60 lokasi tadi Sebagian sudah dilakukan identifikasi lokasi kami juga membagi lokasi ke seluruh eselon II lingkup DJPT. Nanti juga akan mengidentifikasi kebutuhan di lokasi apakah membutuhkan CS atau sebagainya. Target akhir Februari selesai identifikasi dan hasilnya akan dilaporkan ke PDSPKP.

Kelemahan kami usulan dari pemda tidak banyak sehingga ketika akan melakukan penganggaran untuk tahun berikutnya data dukungnya kurang. Selain program Kalaju, DJPT juga ada program Koorporasi nelayan di beberapa lokasi salah satunya di Cilacap dimana sudah mendapatkan BP GBP tahun 2022.



8.3. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Hasil Penelaahan Katalog Elektronik Sektor Etalase Produk Gudang Beku Portable

Rapat dilaksanakan pada 20 Februari 2023, dibuka dan dipimpin oleh Ibu Yani sebagai Koordinator, dan dihadiri oleh perwakilan Biro Umum dan PBJ, perwakilan DJPT, perwakilan DJPB, perwakilan DJPRL, dan perwakilan DJPDSPKP. Tujuan rapat untuk finalisasi draft Permen sebelum diproses untuk tanda tangan ke MKP sehingga harapannya ketika kegiatan selesai tidak akan ada hal-hal yang terlewat yang diumumkan dalam katalog. Dikarenakan tidak adanya Sekjen Definitif oleh karena itu tanda tangan harus ke MKP sehingga akan ada beberapa pihak yang akan memberikan paraf

antara lain Plt Itjen, Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan.

Direktorat logistik Sudah melaksanakan sosialisasi kepada vendor bersama dengan Biro Umum dan PBJ terkait hal tersebut sempat menjadi pertanyaan apakah memungkinkan untuk melakukan pembelian, karena belum resmi pengumannya diluncurkan sebaiknya menunggu resmi dulu baru bisa membeli, karena apabila membeli dahulu dengan produk yang sebelumnya tayang maka akan jadi kesalahan prosedur.

Salah satu latar belakang usulan produk adalah Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi hal ini didasarkan pada pengadaan yang telah dilakukan tahun 2022 sehingga terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dan diwujudkan dalam laporan Monev. Laporan tersebut sudah disampaikan ke Biro Umum dan PBJ.

Sehubungan GBP adalah barang dan tidak ada pembangunan maka KBLI 41019 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya) tidak perlu dicantumkan. Harga Kabupaten/Kota adalah harga yang ditawarkan oleh penyedia berlaku per kabupaten/kota dan sudah termasuk ongkos kirim ke lokasi dari kabupaten/kota. Penulisan genset diseragamkan menjadi generator set. Rumah Pelindung dirancang menggunakan bahan tertentu untuk melindungi gudang beku portable dan/atau peralatan pendukungnya dari sinar matahari, hujan, dan gangguan lainnya. Garansi purna jual berisi informasi layanan purna jual produk, minimal 2 (dua) tahun untuk sistem pendingin. Tindak lanjut dari Finalisasi rancangan Permen KP ini draft akan disampaikan kembali ke masing-masing eselon I untuk dimintakan paraf kemudian setelah itu akan diproses untuk penandatungannya kepada MKP.



3.2.8. Sasaran Kegiatan Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan

9. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2023 adalah 26 (dua puluh enam) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Pengadaan sarana distribusi yang disediakan

Σa :

Jumlah mobil refrigerasi yang disediakan

Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir.

Tabel 12. Target dan capaian IK 9

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target sd TW 4
9	SK6. Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan						
	IK9. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	PA	-	26	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 3 (tiga) Rincian Output (RO) yaitu QEG Mobil Refrigerasi, Mobil Refrigerasi (MP Korporasi) dan Mobil Refrigerasi mendukung revitalisasi tambak dengan pagu awal sebesar Rp22.652.937.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 6.256.950.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp306.862.224,-,- atau sebesar 2,33% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

9.1. Identifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berefrigerasi Tahun 2023.

Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berefrigerasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pengangkutan dan pendistribusian hasil perikanan dengan sistem rantai dingin untuk meningkatkan daya saing, konektivitas logistik serta nilai tambah produk perikanan.

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemerataan dan keterjangkauan bahan baku hasil perikanan untuk kebutuhan industri dan konsumsi masyarakat. Serta untuk mempertahankan mutu hasil perikanan pada saat pengangkutan oleh penerima bantuan.

Pada bulan Januari 2023 dilakukan beberapa identifikasi dan validasi calon penerima bantuan pemerintah sarana kendaraan berefrigerasi yaitu:

- 1) Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Koperasi Nelayan Biringkassi Bahari Mandiri;
 - b. Koperasi Produsen Perikanan Rawa Subur Mandiri; dan
 - c. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Masaro Cinnae.
- 2) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
 - a. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Rahmat Rayeuk; dan
 - b. Perkumpulan Nelayan Kota Langsa.

Proses identifikasi dan validasi untuk melihat kesiapan calon penerima bantuan untuk memenuhi kriteria teknis, administrasi dan usaha yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:90/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.

Dokumentasi Identifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan





3.2.9. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

10. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2023 adalah 8 (delapan) Lembaga dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Lembaga Pengelola Gudang yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

Σa :

Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

Tabel 13. Target dan capaian IK 10

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target sd TW 4
10	SK9. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang						
	IK10. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	PA	2	8	3	37,5

Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya pengurangan dari target tahun 2022 sebanyak 2 lembaga atau 20% karena pagu anggaran tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp 200.000.000,- atau sebesar 20% dari tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan TW I Tahun 2023 adalah sebanyak 3 lembaga atau 150% terhadap target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 periode yang sama, terdapat peningkatan 1 lembaga.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem resi gudang perikanan perlu dilakukan penyiapan kelembagaan mulai dari kelembagaan pemilik ikan, pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian untuk uji mutu ikan, lembaga pembiayaan, asuransi yang didukung oleh pusat registrasi serta pembinaan baik dari Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan resi gudang dan Kementerian Kelautan Perikanan sebagai pembina pelaku usaha perikanan. Oleh sebab itu pengembangan sistem resi gudang komoditas ikan perlu penyiapan kelembagaan sebagai perangkat pelaksanaan.

Pendampingan dilakukan pasca sosialisasi dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha dalam perizinan kelembagaan Sistem Resi Gudang. Pelaku yang didampingi merupakan pelaku dari peserta sosialisasi yang tertarik lebih lanjut terkait implementasi Sistem Resi Gudang.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu awal sebesar Rp 800.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 240.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp 71.762.500,- atau sebesar 8,97% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

10.1. Kegiatan Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan Sistem Resi Gudang Komoditas Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sosialisasi inisiasi dan inisiasi kelembagaan SRG secara luring dan daring pada tanggal 2 Maret 2023 di kantor Dinas KP Provinsi NTT. Kegiatan dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Kepala Dinas KP NTT, Kadis Perindag Kop Kab.Kupang, Kadis Perikanan Kab.Kupang, Kadis Perikanan

Kab.Sumba Timur, Stasiun KIPM Kupang, Bank NTT, PT.Bumi Biru Sejahtera, CV.Agar Berkembang, CV.Biota Laut, TPUKP Kota/Kab.Kupang, Koperasi AL, Pembudidaya RL, Pedagang Pengumpul RL. Hadir secara online antara lain JFT utama (Pak Saut Hutagalung dan Ibu Innes Rahmania), perwakilan es II lingkup PDS, dan DKP kab/kota di wilayah Provinsi NTT. Tujuannya adalah memberikan Informasi dan inisiasi terhadap kelembagaan resi gudang.

Sistem resi gudang dipandang selaras dengan terbitnya Pergub NTT no.39 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Pergub no.106 tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di NTT. Proses industrialisasi rumput laut untuk dikirim keluar dengan kondisi sudah diolah menjadi produk bernilai tambah, merupakan salah satu upaya hilirisasi hasil perikanan. Sistem resi gudang diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk permodalan selama masa simpan sebelum diolah atau dipasarkan atau ketika musim panen saat harga jatuh. Kondisi saat ini pasokan rumput laut sedang berkurang, namun Bappebti dan Ditjen PDSPKP mendorong pelaku usaha untuk dapat segera mengurus izin pengelola gudang dan izin gudang SRG, agar momentum saat dibutuhkan tidak terlewat.

Hasil pada kegiatan ini sebagai berikut:

1. Fasilitasi penataan rantai pasok hasil perikanan melalui implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas ikan dan rumput laut juga harus melibatkan pemilik ikan, pembudidaya rumput laut, kelompok nelayan ataupun pengolah supaya dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang sebagai alternatif penyimpanan barang. Pelaku usaha yang akan terlibat dalam SRG harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bappebti. Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan dapat berkolaborasi dengan Pengelola Gudang SRG, baik sebagai penyedia gudang SRG, pemasok bahan baku atau sebagai offtaker dari ikan atau rumput laut milik produsen.
2. Perusahaan yang dapat mengajukan proses persetujuan menjadi pengelola Gudang adalah yang Berbentuk Badan Usaha berbadan hukum, seperti Perseroan, Perum, Koperasi dan Perusda, Sedangkan untuk CV, UD dan lainnya belum dapat diakomodir. Namun Pelaku usaha yang tidak berbadan hukum yang tidak diakomodir sebagai pengelola Gudang, tetap dapat mendaftarkan gudangnya sebagai Gudang SRG, dan melakukan pengelolaan kerjasama dengan Pengelola Gudang SRG yang telah ditetapkan/ditetujui.
3. LPK uji mutu tetap menjadi syarat dalam implementasi SRG, meskipun kualitas produk sudah bagus. Telah diinfokan bahwa sebagai alternatif pembiayaan, lembaga pembiayaan akan melakukan mitigasi risiko, salah satunya dilakukan dengan penjaminan mutu atas produk yang dijamin.
4. Kelembagaan pengelola gudang SRG yang akan ditindak lanjut inisiasi kelembagaan SRG yaitu PT. Rote Karaginan, PT. Bumi Biru, dan PT. Astil.
5. Dalam rangka mengantisipasi pembudidaya/koperasi yang kesulitan permodalan, pelaku usaha potensial yang memiliki gudang penyimpanan

dapat mengurus persyaratan sebagai pengelola gudang terlebih dahulu, sehingga saat pembudidaya/koperasi melakukan penitipan barang, resinya dapat diterbitkan dan dijamin untuk menambah modal usaha bagi pembudidaya/koperasi yang bersangkutan.



3.2.10. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

11. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 3 (tiga) Lembaga dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Σa :

Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya persamaan target tahun 2022 dengan 2023 yaitu 3 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam

dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I, dimana sesuai dengan matrik rencana aksi. Target 1 lembaga pada triwulan III dan 2 lembaga pada triwulan IV.

Tabel 14. Target dan capaian IK 11

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target TW 4
11	SK10. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan						
	IK11. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	PA	-	3	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu awal sebesar Rp 1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp 34.052.142,- atau sebesar 3,41% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

11.1. Dalam rangka pengelolaan Kapal Jananuraga (ex. Kapal Silver Sea 2) yang saat ini bersandar di Pelabuhan CT-3 BPKS Sabang

Perkembangan Proses Penghapusan dan Mekanisme Penjualan Kapal Jananuraga. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka pengecekan fisik Kapal Jananuraga ke Pelabuhan CT-3 BPKS Sabang pada tanggal 16-18 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kunjungan lapangan dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Negara serta didampingi oleh perwakilan Biro Keuangan Setjen KKP, Inspektorat IV KKP, Setditjen PDSPKP dan Direktorat Logistik.
- b. Kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka pengecekan fisik Kapal Jananuraga untuk melengkapi kelengkapan dokumen telaahan sebagai dasar pertimbangan kepada Presiden RI untuk memberi persetujuan atau

- penolakan terhadap permohonan penjualan BMN Kapal Jananuraga melalui mekanisme penjualan (pelelangan).
- c. Pengecekan fisik kapal jananuraga dilakukan dengan melihat secara visual kondisi kapal dan tidak dilakukan pengujian dikarenakan kapal tidak dapat dioperasikan pada saat dilakukan pengecekan dengan output berupa Berita Acara Pengecekan Fisik beserta dokumentasinya sebagaimana pada lampiran 2.
 - d. Berdasarkan hasil pengecekan fisik dimaksud, diketahui bahwa secara fisik Kapal Jananuraga tidak dapat digunakan karena kondisi rusak dan secara teknik tidak dapat difungsikan sehingga tidak laik laut.
 - e. Tim Sekretariat Negara menginformasikan bahwa persetujuan permohonan penjualan BMN Kapal Jananuraga dari Presiden RI paling lambat akan terbit pada awal bulan April 2023.
 - f. Berdasarkan pengecekan di lapangan, fender kapal di dermaga Pelabuhan CT-3 BPKS yang menjadi sandaran Kapal Jananuraga telah mengalami kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pergerakan kapal pada saat terjadi cuaca ekstrim.
 - g. Adapun Rencana perbaikan sementara fender dimaksud diestimasikan membutuhkan waktu pekerjaan sekitar 12 hari kalender dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 49.950.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran 3.
 - h. Anggaran perbaikan sementara fender telah dialokasikan pada Satker Sekretariat Ditjen PDSPKP yang tersedia di kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Jananuraga dengan akun Belanja Jasa Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Logistik telah mengusulkan dokumen administrasi kepada Sekretariat Ditjen PDSPKP untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.



3.2.11. Sasaran Kegiatan Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen

12. Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)

Definisi indikator ini adalah Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya untuk

mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Layanan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

L = Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP, dengan kegiatan antara lain :

- Perijinan usaha Pasca panen yang diterbitkan
- Sosialisasi Perijinan yang dilaksanakan
- Survei Kepuasan masyarakat

Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I, karena merupakan Layanan publik yang akan dilaporkan Dalam 1 tahun pada triwulan IV.

Tabel 15. Target dan capaian IK 12

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target TW 4
12	SK11. Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen						
	IK12. Layananan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BAH Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen dengan pagu awal sebesar Rp 500.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 150.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp18.263.064,- atau sebesar 3,65% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

12.1. Sosialisasi Layanan Ijin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan.

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari di Bogor, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan dalam memberikan layanan yang prima kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dihadiri oleh Perwakilan Pusdatin, Sedditjen PDSPKP, Subkoordinator Jasa Logistik, Subkoordinator Tata Usaha, Petugas PTSP lingkup Direktorat Logistik. Tujuannya adalah memberikan Informasi kepada stakeholder tentang Layanan ijin usaha jasa pasca panen. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) khususnya Ijin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Direktur Perizinan Berusaha Sektor Industri, Kementerian Investasi/BKPM.



3.2.12. Sasaran Kegiatan Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

13. Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan berupa IPAL yang berfungsi untuk mendukung fungsi bangunan penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Σa :

Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa

direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I, karena merupakan indikator yang dimasukkan dalam *automatic adjustment*.

Tabel 16. Target dan capaian IK 13

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target TW 4
13	SK12. Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton						
	IK13. Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I terdapat permasalahan, yaitu keseluruhan anggaran di blokir. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp 381.296.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 381.296.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

3.2.13. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku

14. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)

Definisi indikator ini adalah Penerapan sistem informasi pengelolaan gudang beku 1000 ton mengacu pada Warehouse Management System (WMS). Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :
Sistem informasi pengelolaan gudang beku

Σa :
Jumlah sistem informasi pengelolaan gudang beku

Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit) merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I.

Tabel 17. Target dan capaian IK 14

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target TW 4
14	SK13. Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku						
	IK14. Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I terdapat permasalahan, yaitu keseluruhan anggaran di blokir. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem informasi pengelolaan gudang beku dengan pagu awal sebesar Rp 225.496.000,-.

Belum terdapat realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

14.1. Rapat Sosialisasi Warehouse Management System (WMS) CS 1000 Ton

Rapat dilaksanakan pada 21 Februari 2023 di Jakarta, dihadiri oleh 8 perwakilan mitra pengguna CS 1000, perwakilan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, perwakilan TU Direktorat Logistik dan pelaksana pada kelompok Pengadaan dan Penyimpanan. Dengan narasumber dari PT. Hima Wasesa Manunggal sebagai pengembang aplikasi WMS.

Rapat bertujuan untuk mensosialisasikan penerapan WMS pada mitra pengguna CS 1000 ton dengan hasil sebagai berikut:

1. Uji coba penerapan WMS akan dilaksanakan selama 2 bulan untuk efektifitas implementasi penggunaan dan melihat permasalahan dalam penerapan aplikasi serta management di cold storage;
2. Untuk mempermudah penggunaan mitra mengusulkan jika proses WMS akan dilakukan jika konfirmasi hanya dapat diterima atau dikirim melalui

sistem kemudian setelah dilakukan persetujuan barang dapat kirim ke gudang penyimpanan. Selanjutnya manajemen penyimpanan akan dilakukan oleh KKP. Begitu juga dengan model pengambilan barang dari cold storage;

3. fasilitas di dalam cold storage dapat dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk implementasi WMS sehingga dapat meminimalisir kendala implementasi dan penggunaan aplikasi WMS;
4. Dalam sistem belum termuat sistem denda untuk cancel pengiriman barang, sehingga perlu penyempurnaan dalam pengembangan aplikasi;
5. Dalam masa trial penerapan WMS ini masih dikombinasikan dengan model manual;
6. Penerapan dilaksanakan minggu ketiga bulan Februari 2023 dengan sampling implementasi menggunakan ruangan cold storage berkapasitas 100 ton.



3.2.14. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

15. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu. Target indikator tahun 2023 adalah 242 (dua ratus dua puluh empat) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :
Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku

Σa :
Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen

Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I.

Tabel 18. Target dan capaian IK 15

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW1	TA 2023	Sd TW1	% thd target TW 4
15	SK14. Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku						
	IK15. Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I terdapat permasalahan, yaitu keseluruhan anggaran di blokir. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu awal sebesar Rp 1.208.408.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 362.522.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW 1 adalah sebesar Rp120.368.400,- atau sebesar 9,96% terhadap pagu.

3.2.15. Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

16. Nilai PNBP Lingkup Direktorat Logistik (Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya
- Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP

- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target indikator tahun 2022 adalah 3,39 milyar dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \Sigma a$$

a = Jumlah PNPB Direktorat logistik

Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Adanya peningkatan target tahun 2023 sebesar 3,27 milyar atau meningkat 96,46% dari target tahun 2022. Target PNBP tahun 2023 sebesar 6,66 milyar. Capaian tahun 2022 sebesar Rp 4.709.973.923,- atau setara dengan 138,9% dari target tahun 2022.

Tabel 19. Target dan capaian IK 16

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW 1	TA 2023	Sd TW 1	% thd target 2023
16	SK15. Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP						
	IK16. Nilai PNBP Lingkup Direktorat Logistik (Milyar)	Unit	PA	-	6,66 milyar	-	-

16.1. Rapat Finalisasi Petunjuk Teknis Penyimpanan Ikan Di Cold Storage 1000 Ton

Rapat dilaksanakan pada 24 Februari 2023 di Jakarta, dihadiri oleh Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Penyimpanan, Subkoordinator Hukum, perwakilan bagian keuangan dan umum, Mitra CS 1000 ton (PT. Jaladhi Hita Abadi, PT. Spektra Tirta Sakti dan PT. Sakana Umi Nusantara Bahari,) JF APHP Madya, Manager Cold Storage 1000 Ton muara baru dan Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan.

Rapat Finalisasi Petunjuk Teknis Penyimpanan Ikan di Cold Storage 1000Ton Muara Baru dengan hasil sebagai berikut:

- a. Eksklusif dan regular dengan dasar pengenaan sama yaitu menggunakan PP 85 Tahun 2021 tentang hanya saja dibedakan berdasarkan ruang penyimpanan terpisah tidak tercampur dengan ikan mitra lain;
- b. Jika perusahaan A mengisi 50 ton di eksklusif, B mengisi regular 50 ton, kenapa untuk yg eksklusif tidak dikenakan sewa sesuai dengan kapasitas;

- c. PP 85 tahun 2021 menggunakan dasar kilogram per hari, volume jumlah ikan yang disimpan;
- d. Eksklusif belum tertuang dalam PP 85 yang membedakan system, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. Spectra rata2 mengisi 20 ton untuk penggunaan tarif eksklusif dapat dikenakan tarif 50% kapasitas; dan
- f. Melakukan analisis hitungan kembali sewa berdasarkan tarif sewa di Gudang milik swasta



16.2. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Sewa Kendaraan Berpendingin

Rapat dilaksanakan pada 1 Maret 2023, dibuka oleh Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan, dihadiri oleh Koordinator Keuangan dan Umum, Subkoordinator Penyimpanan, Inspektorat IV, PT Perikanan Indonesia, APHP Madya dan Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan.

Rapat evaluasi pemanfaatan sewa kendaraan berpendingin dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kerjasama pemanfaatan kendaraan bermotor sebanyak 6 unit telah berakhir masa sewa, yaitu : Ambon (5 Mei 2022), Sorong (23 April 2022), Pemangkat (20 April 2022), Padang (4 Mei 2022), Makassar (5 Mei 2022 & 23 April 2022);
- b. Surat persetujuan sewa baru terbit Nomor S556/MK.6/KNL.0702/2022 terbit tanggal 12 September 2022 (Ambon, Sorong, Pemangkat, Padang) dan surat perjanjian sewa baru Nomor S-876/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 26 Desember 2022 (Makassar 2 unit) dengan nilai Rp. 250.983.000 untuk periode November 2022-2023 dan Januari 2023-2024;
- c. Berdasarkan surat Inspektur IV kepada Direktur Logistik Nomor:R.38/ITJ.4/HP.380/II/2023 Perihal Hasil Reviu Pemanfaatan Kendaraan Bermotor di Padang, Pemangkat, Ambon, Sorong dan Makassar pada Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Februari 2023, masih terdapat **terhutang oleh pihak PT. Perindo sebesar Rp. 196.552.871**, dengan rincian lokasi Ambon 208 hari, Sorong 220 hari, pemangkat 223 hari, Padang 209 hari, Makassar 258 hari dan 270 hari;
- d. BPK sudah melakukan pemetaan data seluruh kendaraan yang disewa oleh PT Perikanan Indonesia, jika ada temuan SPI secara total mencapai 600 jutaan. Untuk menjadi perhatian PT Perikanan Indonesia dapat menjadi

perhatian dan dapat diselesaikan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- e. Dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh PT Perikanan Indonesia untuk pengelolaan BMN sehingga optimal dalam pengelolaanya dan tidak ditemukan lagi permasalahan dikemudian yang dapat menjadi temuan tim pemeriksa.

Tindak lanjut sebagai berikut : 1) segera dilakukan penyampaian surat penagihan untuk semua kendaraan yang masih belum diselesaikan baik secara administrasi maupun pembayaran; dan 2) meminta PT Perikanan Indonesia untuk segera menyampaikan surat perpanjangan atau mengembalikan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan bermotor kepada Ditjen PDSPKP.



3.2.16. Sasaran Kegiatan Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

17. Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik.

Target indikator tahun 2023 adalah sebesar 1215 orang dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik

Σa :

Jumlah Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik

Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Terdapat peningkatan target tahun 2023 sebesar 90 tenaga kerja yang terlibat atau sebesar 8% target 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Target pelaporannya adalah pada TW IV, capaian tahun 2022 sebesar 1439 orang yang terdiri dari 1312 orang tenaga kerja tidak langsung/ penerima bantuan pemerintah dan sebesar 127 orang tenaga kerja langsung/ proyek.

Tabel 20. Target dan capaian IK 17

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1`	TA 2023	TW1	% thd target 2023
17	SK16. Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP						
	IK17. Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik (Orang)	Unit	PA	-	1215 orang	-	-

3.2.17. Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Logistik

18.Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Logistik (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Formulasi :

$$IP_{Logistik} = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan :

$IP_{Logistik}$ = Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Logistik

IP_1 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Disiplin

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,2. Indikator kinerja ini bersifat semesteran, sehingga tidak dihitung pada triwulan I tahun 2023. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023

Capaian tahun 2022 adalah sebesar 84,17. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 2,1%, dimana capaian tahun 2021 sebesar 82,37.

Tabel 21. Target dan capaian IK 18

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				s.d. TW I	TA 2023	s.d. TW I	% thd target SM2
18	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK18. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik (Indeks)	Indeks	SM	-	83,2	-	-

19. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi

SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Formulasi :

$$X = \Sigma a$$

X :

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik

Σa :

Jumlah Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV dengan target rekonsiliasi kinerja Direktorat Logistik sebesar 93. Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 22. Target dan capaian IK 19

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target sd TW4
19	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	PA	-	93	-	-

20. Indikator Kinerja Kegiatan Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Direktorat Logistik tahun 2022.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X :

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik

Σa :

Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat Logistik Tahun 2022

Σb :

Jumlah realisasi anggaran Unit Direktorat Logistik Tahun 2022

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV dengan target sebesar ≤0,5. Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 23. Target dan capaian IK 20

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				sd TW1	TA 2023	sd TW1	% thd target sd TW 4
20	Sk17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK20. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	PA	-	≤0,5	-	-

21.Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh unit Direktorat Logistik.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X :

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik

Σa :

Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti

Σb :

Jumlah rekomendasi yang diberikan

Persentase unit kerja yang melaksanakan Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian pada TW I adalah sebesar 98 atau 130,67% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TW I pada tahun 2022, capaian 98,20% atau turun 0,2% dari capaian TW 1 tahun 2022. Hal ini disebabkan Adanya perubahan pada perhitungan manual iku yaitu hanya status **Tuntas** saja yang dihitung menjadi capaian. Namun demikian target tahun 2023 meningkat dari 70 menjadi 75 pada tahun 2023.

Tabel 24. Target dan capaian IK 21

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target 2023
21	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK21. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	75	75	98	130,67

22. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24

Formulasi :

Pemenuhan Dokumen :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

Keaktifan :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

$$MP_{\text{Unit Level I}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV

Persentase unit kerja yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Logistik Tahun 2023 ditargetkan sebesar 92. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian pada TW I adalah sebesar 100 atau 108,69% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TW I pada tahun 2022, capaian 100. Adanya peningkatan dari target tahun 2023 yaitu dari 86 menjadi 92 atau naik 6 poin dari tahun 2022.

Tabel 25. Target dan capaian IK 22

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target TW 1
22	S17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK22. Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	92	92	100	108,69

23. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran.

$$x = \Sigma a/b \times 100\%$$

a = nilai anggaran yang direalisasikan (Rp)

b = nilai pagu anggaran (Rp)

X =Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Logistik (%)

Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 95%. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian akan dilaporkan pada TW IV.

Tabel 26. Target dan capaian IK 23

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target TW 4
23	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK23. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	95	-	-

24. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Direktorat Logistik terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formulasi :

$$x = A + B$$

X :

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik

A : Aspek market (40%)

B : Aspek demand (60%)

Penilaian IKU level eselon 2 dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilengkapi dengan data dukung

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perhitungan capaian dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW I belum ada capaian.

Tabel 27. Target dan capaian IK 24

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target TW 1
24	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	77,5	-	-

25. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Logistik . Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden
6. Pertimbangan lainnya yang relevan

$$Efektivitas = 80\% PT + 10\% IG + 10\% AT$$

Keterangan :

Efektivitas = Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis

PT = Pencapaian Tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV tahun 2023 dengan Persentase Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Logistik (%) ditargetkan sebesar 77,5. Indikator kegiatan ini merupakan lanjutan dari indikator tahun 2022, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 99 atau sebesar 132% dari target 2022.

Tabel 28. Target dan capaian IK 24

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target TW 4
25	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK24. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	77,5	-	-

26. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formulasi :

$$x = 1 + 2 + \dots + 5$$

X :

Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (10%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perhitungan capaian dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW I belum ada capaian.

Tabel 29. Target dan capaian IK 26

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW1	TA 2023	TW1	% thd target TW 4
26	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK26. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	PA	-	77,5	-	-

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Pagu Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2023 sebesar Rp77.144.186.000,-, sedangkan total anggaran blokir *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 18.344.823.000,- yang tersebar pada 13 Rincian Output (RO).

Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan TW I adalah sebesar Rp2.608.752.124,-, sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar **3,38% (sumber data Aplikasi Omspan dan Sakti)**

Adapun tabel realisasi anggaran **Direktorat Logistik** sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Anggaran Pasca AA (Rp)	Blokir AA (Rp)	Realisasi keuangan		
									Total		
									Rp	%	
Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	1	Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	1	1	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.000.000.000	1.646.333.000	353.667.000	428.994.736	21,45
Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	2	Jumlah data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Data	2	2	Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.467.500.000	1.027.250.000	440.250.000	263025613	17,92
Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	3	Jumlah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Lembaga	1	3	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000	166931559	16,69
	4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Rekomendasi kebijakan	1	4	Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000	113593133	11,36
Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	5	Jumlah pelaku usaha KP yang dimitirkan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	5	Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan	900.000.000	630.000.000	270.000.000	226816210	25,20

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung		Anggaran/Pagu (Rp)	Anggaran Pasca AA (Rp)	Blokir AA (Rp)	Realisasi keuangan	
										Total	
										Rp	%
Terdistribuskannya hasil kelautan dan perikanan	6	Jumlah pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	6	Kemitraan dalam rangka distribusi hasil perikanan	900.000.000	630.000.000	270.000.000	65797874	7,31
Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	7	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	19	7	Pengadaan Gudang Beku Portable	43.108.549.000	34.388.411.000	8.720.138.000	520.870.055	1,21
Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	8	Jumlah pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	26	8	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin)	18.296.607.000	12.039.657.000	6.256.950.000	451014072	2,47
					9	Pengadaan Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742.730.000	1.742.730.000	-	0	-
					10	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	2.613.600.000	2.613.600.000	-	19776500	0,76
Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	9	Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	8	11	Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	800.000.000	560.000.000	240.000.000	103538576	12,94

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Anggaran Pasca AA (Rp)	Blokir AA (Rp)	Realisasi keuangan		
									Total		
									Rp	%	
Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan	10	Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	3	12	Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000	84922562	8,49
Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	11	Jumlah Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	1	13	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	500.000.000	350.000.000	150.000.000	43102834	8,62
Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12	Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	1	14	Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	381.296.000	-	381.296.000	0	-
Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	13	Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	1	15	Sistem informasi pengelolaan gudang beku	225.496.000	225.496.000	-	0	-
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	14	Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	242	16	Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.208.408.000	845.886.000	362.522.000	120.368.400	9,96

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Logistik tahun 2023 memiliki 26 indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan, 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran dan 21 indikator kinerja yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Maret 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan TW I sebesar 108,59. Nilai capaian TW I naik 3,59 poin atau sebesar 3,4% dari capaian tahun 2022 periode yang sama yaitu sebesar 105. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, sehingga tidak ada rekomendasi untuk perbaikan pada Triwulan II.

Terdapat 5 (lima) IKK Direktorat Logistik yang terdapat capaiannya pada Triwulan I yaitu :

1. IKK 6. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan), target 5 kesepakatan, capaian 5 kesepakatan;
2. IKK 7. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan), target 3 kesepakatan, capaian 3 kesepakatan;
3. IKK 10. Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga), target 2 lembaga, capaian 3 lembaga;
4. IKK 21. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik, target 75, capaian 98;
5. IKK 22. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar, target 92, capaian 100.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

EVALUASI RENCANA AKSI DIREKTORAT LOGISTIK TRIWULAN I TA 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung		Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Rincian Target Output/Komponen				Rincian Capaian Output/Komponen				Permasalahan	Rekomendasi
									s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV		
1	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola (Koridor)	1	Penyusunan Dokumen Laporan pengelolaan koridor	10.000	Koridor	5	0	0	0	5	0					
2	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	2	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	2	Implementasi Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.000.000	Unit	1	0	0	0	1	0					
3	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	3	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	3	Penyusunan Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.467.500	Data	2	0	0	0	2	0					
4	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	4	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	4	Pembinaan Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	990.000	Lembaga	1	0	0	0	1	0					
		5	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	5	Penyusunan Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.000.000	Rekomendasi	1	0	0	0	1	0					
5	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	6	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	6	Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan	900.000	Kesepakatan	18	5	9	14	18	5					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Rincian Target Output/Komponen				Rincian Capaian Output/Komponen				Permasalahan	Rekomendasi		
							s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				
6	Terdistribuskannya hasil kelautan dan perikanan	7	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	7	Kemitraan dalam rangka distribusi hasil perikanan	900.000	Kesepakatan	18	3	8	13	18	3					
7	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	8	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	8	Pengadaan Gudang Beku Portable	43.083.549	Unit	19	0	0	0	19	0					
8	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	9	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	9	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin)	18.271.607	Unit	21	0	0	21	21	0					
				10	Pengadaan Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742.730	Unit	2	0	0	2	2	0					
				11	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	2.613.600	Unit	3	0	0	3	3	0					
9	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	10	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	12	Fasilitasi Pengelola Gudang untuk Penerapan Sistem Resi Gudang	800.000	Lembaga	8	2	4	6	8	3					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung		Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Rincian Target Output/Komponen				Rincian Capaian Output/Komponen				Permasalahan	Rekomendasi
									s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV		
10	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan	11	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	13	Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	1.000.000	Lembaga	3	0	0	1	3	0					
11	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	12	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	14	Pelaksanaan Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	500.000	Layanan	1	0	0	0	1	0					
12	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	13	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	15	Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	381.296	Unit	1	0	0	0	1	0					
13	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	14	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	16	Penyediaan Sistem informasi pengelolaan gudang beku	225.496	Unit	1	0	0	0	1	0					
14	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	15	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	17	Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.158.408	Unit	242	0	0	0	242	86					
15	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPPK	16	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	18	Penghitungan nilai PNBP lingkungan Direktorat Logistik	50.000	Laporan	12	3	6	9	12	3					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Rincian Target Output/Komponen				Rincian Capaian Output/Komponen				Permasalahan	Rekomendasi
								s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV		
16	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	17	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	19	Penghitungan tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk KP lingkungan Direktorat Logistik	50.000	Dokumen	1	0	0	0	1	0				
17	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	18	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	20	Pemenuhan dokumen indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				
		19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	21	Pemenuhan dokumen Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				
		20	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik (%)	22	Pemenuhan dokumen tindak lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Rincian Target Output/Komponen				Rincian Capaian Output/Komponen				Permasalahan	Rekomendasi
								s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV		
		21	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	23	Pemenuhan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				
		22	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	24	Pemenuhan dokumen sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				
		23	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	25	Perhitungan persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	26	Pemenuhan dokumen Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp.000)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Rincian Target Output/Komponen				Rincian Capaian Output/Komponen				Permasalahan	Rekomendasi
								s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV		
		25	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)	27	Pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				
		26	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)	28	Pemenuhan dokumen Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Logistik		Kegiatan	1	0	0	0	1	0				